



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

APBN KITA

KINERJA & FAKTA

APBN Tumbuh Positif dan Solid

menjaga pemulihan ekonomi
dan melindungi masyarakat

AGUSTUS 2023

Scan dan Unduh
APBN KITA



ISSN link
APBN KiTa



Note:

Bagi pihak yang akan mengutip sebagian dan atau seluruh materi dari publikasi APBN KiTa ini dapat menghubungi redaksi di <https://forms.gle/GBYWRJyMLJtF5gq5A>.



“Ekonomi Indonesia sampai dengan kuartal kedua masih tumbuh sangat baik di 5,17 persen karena faktor domestik kita yang masih kuat yaitu konsumsi dari rumah tangga, Pemerintah, dan investasi yang tumbuh secara kuat sehingga menetralkan pelemahan eksternal.”

**Menteri Keuangan,
Sri Mulyani Indrawati**

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	7
Perkembangan Ekonomi Makro	15
Postur APBN	19
Laporan Khusus	22
Penerimaan Pajak	49
Penerimaan Bea dan Cukai	57
Penerimaan Negara Bukan Pajak	63
Belanja Pemerintah Pusat	69
Transfer ke Daerah	75
Pembiayaan Utang	81





Diterbitkan oleh: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pelindung: Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan.

Pengarah: Pimpinan Unit Eselon I Kemenkeu **Penanggung Jawab:**

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Sekretaris Komite Asset-

Liability Committee Kementerian Keuangan. **Pemimpin Redaksi:**

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Direktur Strategi dan Portofolio

Pembiayaan, Kepala Pusat

Kebijakan Ekonomi Makro. **Dewan**

Redaksi: Tim *Deputies Asset-Liability Committee* Kementerian Keuangan. **Tim Redaksi:** Tim

Teknis *Asset-Liability Committee* Kementerian Keuangan, Tim Redaksi Penyusun Publikasi

APBN KiTa. **Editor:** Tim Editor Penyusun Publikasi APBN KiTa

Desain Grafis, Layout dan Foto: Biro KLI Kementerian Keuangan.

Alamat Redaksi: Gedung Frans Seda Lantai 8, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta.



Pendapatan Negara sebesar Rp1.614,75 triliun atau 65,56 persen dari Target dan tumbuh 4,10 persen (*yoy*).

Realisasi tersebut terdiri atas Penerimaan Pajak sebesar Rp1.109,10 triliun (64,56 persen dari Target), tumbuh 7,84 persen (*yoy*), serta Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai sebesar Rp149,78 triliun (49,40 persen dari Target), turun 19,07 persen (*yoy*).



Penerimaan Negara Bukan Pajak telah mencapai Rp355,55 triliun (80,55 persen dari Target), tumbuh 5,41 persen (*yoy*).

Penerimaan Hibah sebesar Rp325,16 miliar, lebih rendah dari realisasi periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp345,28 miliar.



Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.020,35 triliun atau 45,42 persen dari Pagu, terkontraksi 1,03 persen (*yoy*), yang terdiri atas realisasi Belanja K/L sebesar Rp492,98 triliun (49,26 persen dari Pagu), tumbuh 0,47 persen (*yoy*), dan realisasi Belanja Non-K/L yang mencapai Rp527,37 triliun (42,34 persen dari Pagu), terkontraksi 2,40 persen (*yoy*).



Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp440,89 triliun (54,12 persen dari Pagu), tumbuh 6,60 persen (*yoy*).

Ringkasan Eksekutif

Kinerja ekonomi di beberapa negara pada kuartal II tahun 2023 mengalami perkembangan yang beragam.

Ekonomi Amerika Serikat tumbuh positif yang lebih ditopang oleh faktor domestik. Ekonomi Tiongkok tumbuh lebih tinggi namun di bawah ekspektasi. Perkembangan ekonomi Eropa tumbuh lambat karena pelemahan sisi produksi dan konsumsi. Perkembangan aktivitas ekonomi global selanjutnya di awal kuartal III memperlihatkan aktivitas manufaktur yang masih

berada pada zona kontraksi. Dari sisi perkembangan harga komoditi global memperlihatkan bahwa harga minyak meningkat dan harga komoditas pangan fluktuatif. Sementara itu, perkembangan ekonomi nasional diperkirakan masih akan tetap kuat selama tahun 2023. Risiko perlambatan global tetap diwaspadai dampaknya terhadap prospek ekonomi nasional.

Hingga akhir bulan Juli 2023, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tercatat Rp1.614,75 triliun atau 65,56 persen dari target pada APBN 2023^[1].

1. Persentase terhadap Target dan Pagu mengacu pada APBN 2023

Capaian tersebut lebih tinggi Rp63,56 triliun dari periode yang sama tahun lalu, masih melanjutkan tren kinerja positif yang terjadi sejak awal tahun 2023, meskipun tren pertumbuhannya melambat. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tumbuh 4,10 persen (yoy). Secara nominal, realisasi komponen Pendapatan Negara yang bersumber dari Penerimaan Perpajakan mencapai Rp1.258,88 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp355,55 triliun, dan realisasi Hibah mencapai Rp0,33 triliun. Capaian Penerimaan Perpajakan tersebut mencapai 62,28 persen dari Target atau tumbuh 3,73 persen (yoy) dan capaian PNBP sebesar 80,55 persen terhadap Target atau tumbuh sebesar 5,41 persen (yoy).

Realisasi Penerimaan Perpajakan bersumber dari Penerimaan Pajak serta Kepabeanan dan Cukai, dimana hingga akhir Juli 2023 capaian Penerimaan Pajak tercatat sebesar Rp1.109,10 triliun dan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp149,78 triliun. Kinerja Penerimaan Perpajakan melambat meskipun masih mengalami pertumbuhan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja Penerimaan Perpajakan tersebut didukung oleh kinerja

Pajak yang tumbuh 7,84 persen (yoy), sementara Kepabeanan dan Cukai hingga akhir Juli 2023 mengalami kontraksi 19,07 persen (yoy). Sementara itu, realisasi Penerimaan Pajak dan Kepabeanan dan Cukai tersebut masing-masing telah mencapai 64,56 persen dan 49,40 persen terhadap Target, yang dipengaruhi oleh faktor kinerja pemulihan ekonomi, moderasi harga komoditas, dan dampak dari implementasi kebijakan perpajakan.

Secara nominal, Penerimaan Pajak utamanya berasal dari Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) non-Migas Rp636,56 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM) Rp417,64 triliun. Kontribusi kedua komponen Penerimaan Pajak tersebut terhadap total Penerimaan Pajak masing-masing sebesar 57,39 persen dan 37,66 persen. Lebih detilnya, penerimaan PPh non-Migas masih ditopang oleh tiga terbesar komponen penerimaan PPh non-Migas yang bersumber dari PPh Pasal 25/29 Badan, PPh Pasal 21, dan PPh Final, dimana kontribusi ketiganya mencapai 75,16 persen dari total penerimaan PPh non-Migas. Berdasarkan pertumbuhannya, PPh non-Migas yang mampu tumbuh 6,98 persen (yoy) didukung utamanya oleh pertumbuhan dari PPh

Pasal 25/29 Badan dan PPh Pasal 21 yang berturut-turut tumbuh 23,74 persen (*yoy*) dan 18,09 persen (*yoy*). Sedangkan pertumbuhan PPh Final hingga akhir Juli 2023 tercatat kembali mengalami kontraksi 44,03 persen (*yoy*), lebih baik dibandingkan periode bulan sebelumnya. Pertumbuhan komponen penerimaan PPh non-Migas tersebut menunjukkan kinerja pertumbuhan ekonomi yang baik, meskipun faktor tren harga komoditas semakin mengalami moderasi, serta adanya kebijakan pajak yang tidak berulang. Lebih lanjut, realisasi Penerimaan Pajak dari komponen penerimaan PPN/PPnBM secara nominal ditopang utamanya oleh penerimaan PPN, khususnya PPN Dalam Negeri (PPN DN) dan PPN Impor dengan kontribusi sebesar 60,82 persen dan 34,69 persen dari total penerimaan PPN/PPnBM. Secara kumulatif PPN/PPnBM masih tumbuh *double digits* sebesar 10,60 persen (*yoy*) meskipun melambat dibandingkan periode bulan sebelumnya. Lebih detilnya, hingga akhir Juli 2023 PPN DN masih tumbuh 17,61 persen (*yoy*), namun PPN Impor pertumbuhannya kembali berkontraksi 2,15 persen (*yoy*). Pertumbuhan penerimaan PPN DN didorong oleh kinerja aktivitas ekonomi terutama tingginya konsumsi dalam

negeri di bulan Juli 2023, serta peningkatan restitusi. Sedangkan PPN Impor kinerjanya dipengaruhi oleh penurunan nilai impor dan aktivitas impor yang mulai melambat pertumbuhannya.

Capaian realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai terdiri dari Penerimaan Cukai Rp115,52 triliun, Bea Masuk (BM) Rp28,40 triliun, dan Bea Keluar (BK) Rp5,86 triliun. Secara nominal, Penerimaan Kepabeanan dan Cukai utamanya didukung oleh penerimaan dari Cukai, khususnya Cukai Hasil Tembakau (CHT) dengan kontribusi mencapai 77,12 persen terhadap total Penerimaan Kepabeanan dan Cukai. Hingga akhir Juli 2023, kinerja komponen Penerimaan Kepabeanan dan Cukai berdasarkan pertumbuhannya tercatat positif hanya pada penerimaan BM, yang tumbuh sebesar 3,83 persen (*yoy*). Sedangkan penerimaan Cukai dan BK berkontraksi masing-masing sebesar 8,54 persen (*yoy*) dan 81,34 persen (*yoy*). Kinerja Penerimaan Kepabeanan dan Cukai hingga akhir Juli didukung oleh kinerja positif BM yang didorong oleh kenaikan tarif rata-rata BM dan faktor nilai tukar yaitu menguatnya Dolar Amerika terhadap Rupiah, meskipun nilai impor cenderung menurun. Lebih lanjut, kinerja

penerimaan Cukai mengalami penurunan akibat turunnya produksi HT setelah pada tahun lalu melonjak akibat adanya kenaikan tarif PPN. Sementara itu, kinerja BK mengalami penurunan akibat harga *Crude Palm Oil* (CPO) yang lebih rendah, serta turunnya volume ekspor komoditas mineral dan tarif BK tembaga.

Realisasi PNBП sampai dengan akhir Juli 2023 mencapai Rp355,54 triliun (80,55 persen terhadap Target) atau tumbuh positif 5,47 persen (yoy). Peningkatan capaian realisasi tersebut bersumber dari realisasi Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND). Sedangkan capaian PNBП Lainnya dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sampai dengan Juli 2023 mengalami pertumbuhan negatif masing-masing sebesar 11,58 persen (yoy) dan 18,08 persen (yoy). Secara lebih rinci, realisasi Pendapatan SDA mencapai Rp156,39 triliun atau tumbuh positif 12,99 persen (yoy). Pertumbuhan positif Pendapatan SDA dibentuk oleh SDA Minerba yang meningkat secara signifikan sebesar 89,90 persen (yoy) meskipun SDA migas mengalami

perlambatan sebesar -23,59 persen (yoy). Pertumbuhan SDA Minerba meningkat utamanya disumbang *royalty* batubara sebagai dampak implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2022. Meski rata-rata Harga Batubara Acuan (HBA) dan volume penjualan batubara menurun, namun kenaikan tarif *royalty* batubara mampu menutupi penurunan tersebut. Selanjutnya, SDA Migas mengalami kontraksi akibat penurunan harga minyak mentah (ICP), *lifting* minyak dan gas bumi. Sedangkan SDA non-Minerba terkontraksi akibat perubahan mekanisme pemungutan PNBП dari pra-Produksi menjadi pasca-Produksi.

Sejalan dengan Pendapatan SDA, PNBП yang berasal dari KND juga mengalami tren positif dengan capaian sebesar Rp60,23 triliun (122,68 persen dari Target) atau tumbuh positif sebesar 58,87 persen (yoy). Capaian positif PNBП KND utamanya didorong oleh kenaikan setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khususnya sektor perbankan.

Sedangkan dari PNBП Lainnya, hingga akhir Juli 2023 terealisasi mencapai Rp96,05 triliun atau turun sebesar 11,58 persen (yoy). Penurunan

realisasi disebabkan oleh masih nihilnya penerimaan *Domestic Market Obligation* (DMO) dan penurunan produksi hasil tambang sebesar 34,99 persen (*yoy*). Pendapatan PNBK Kementerian/Lembaga (K/L) tumbuh 10,61 persen (*yoy*).

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari BLU juga mengalami pertumbuhan negatif dengan capaian realisasi sebesar Rp42,86 triliun atau turun 18,08 persen (*yoy*). Penurunan pada pendapatan BLU disebabkan berkurangnya Pendapatan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit dampak penurunan harga CPO sejak bulan Maret 2023. Penurunan harga CPO ini disebabkan penurunan *demand* akibat pulihnya *supply* minyak nabati.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Juli 2023 mencapai Rp1.461,2 triliun atau 47,73 persen dari Pagu, dan mencatatkan pertumbuhan sebesar 1,15 persen (*yoy*). Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp1.020,35 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp440,89 triliun. Realisasi BPP dipengaruhi meningkatnya realisasi Belanja Pegawai yang tumbuh 3,10 persen (*yoy*) utamanya untuk pembayaran gaji dan tunjangan

ASN/TNI/POLRI serta pembayaran manfaat pensiun, termasuk gaji ke-13 dan THR. Realisasi Belanja Negara juga didorong oleh Belanja Modal hingga mencapai Rp83,0 triliun atau tumbuh 18,18 persen (*yoy*) yang dimanfaatkan untuk mendukung proyek infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan sarana prasarana (*sarpras*) pertahanan dan keamanan (*hankam*). Selain itu realisasi Belanja Sosial tumbuh 2,69 persen (*yoy*) dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di antaranya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Realisasi Belanja Subsidi sampai dengan akhir Juli 2023 mencapai Rp112,40 triliun atau 37,65 persen dari Pagu, turun 3,28 persen (*yoy*). Realisasi Belanja Subsidi tersebut meliputi Subsidi Energi sebesar Rp 79,87 triliun, turun 9,97 persen (*yoy*) dan Subsidi non-Energi sebesar Rp 32,52 triliun, naik 18,31 persen (*yoy*).

Realisasi Belanja Subsidi Energi utamanya bersumber dari subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan *Liquidified Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kg yang mencapai Rp 48,10 triliun (34,50 persen dari Pagu). Secara tahunan pertumbuhan realisasi Subsidi BBM dan LPG Tabung 3 kg mengalami penurunan sebesar

23,29 persen. Penurunan realisasi Subsidi BBM dan Subsidi LPG Tabung 3 Kg di antaranya dipengaruhi penurunan ICP yang rata-rata turun sebesar 28,03 persen (yoy) selama periode Januari-Juli 2023. Namun, apabila dilihat dari sisi volume, konsumsi jenis BBM tertentu (JBT) mengalami penurunan, sedangkan konsumsi LPG 3 Kg mengalami kenaikan. Total volume konsumsi JBT (minyak tanah, solar, dan biosolar) hingga Juli 2023 mengalami penurunan sebesar 5,25 persen (yoy) sedangkan untuk volume konsumsi LPG 3 Kg naik sebesar 2,18 persen (yoy). Sementara itu, realisasi Subsidi Listrik mencapai Rp31,78 triliun atau 43,79 persen dari Pagu atau mengalami kenaikan sebesar 22,13 persen (yoy). Adapun kenaikan tersebut di antaranya dipengaruhi oleh depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika.

Selanjutnya, realisasi Belanja Subsidi non-Energi pada Januari s.d. Juli 2023 sebesar Rp32,52 triliun, atau 37,59 persen dari Pagu. Realisasi tersebut masih didominasi oleh Subsidi Kredit Program sebesar Rp17,33 triliun atau 53,27 persen dari total realisasi Subsidi non-Energi. Kemudian Subsidi Pupuk menyusul sebagai kontributor kedua terbesar dengan realisasi sebesar Rp10,67 triliun atau

sebesar 32,81 persen terhadap realisasi Subsidi non-Energi. Penyaluran Subsidi Pupuk sampai dengan Juli 2023 mengalami penurunan sebesar 15,95 persen (yoy), yang disebabkan oleh penurunan penyaluran volume pupuk bersubsidi sebanyak 4,62 juta ton pada bulan Juli tahun 2022 menjadi 4,12 juta ton pada tahun 2023. Penurunan tersebut salah satunya disebabkan oleh revisi Peraturan Menteri Pertanian yang membatasi pemberian subsidi pupuk hanya kepada 2 jenis pupuk saja yaitu Urea dan NPK, serta hanya diberikan untuk 9 komoditas prioritas. Secara keseluruhan realisasi Subsidi non-Energi tetap mengalami peningkatan sebesar 18,31 persen (yoy). Peningkatan tersebut disumbang oleh pertumbuhan realisasi Subsidi Bunga Kredit Program yang tumbuh sebesar 8,78 persen (yoy) serta disusul oleh pertumbuhan realisasi Subsidi Pupuk sebesar 7,38 persen (yoy). Sementara di sisi lain, subsidi *Public Service Obligation* (PSO) mengalami penurunan sebesar 5,65 persen (yoy).

Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Juli 2023 mencapai Rp440,89 triliun atau 54,12 persen dari Pagu, naik 6,60 persen (yoy). Secara umum, pertumbuhan realisasi TKD utamanya ditopang oleh realisasi Dana Bagi

Hasil (DBH) yang mencapai Rp55,65 triliun atau lebih tinggi Rp23,15 triliun, atau 71,22 persen (yoy). Realisasi DBH tersebut utamanya disebabkan oleh realisasi DBH-SDA Pertambangan Umum yang mencapai Rp26,46 triliun, naik 186,16 persen (yoy).

Sementara itu, terdapat pula jenis TKD lainnya mengalami penurunan realisasi dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut secara umum disebabkan oleh menurunnya kepatuhan Pemerintah Daerah dalam memenuhi syarat salur.

Pemerintah berkomitmen untuk menjaga kesinambungan fiskal. Realisasi Anggaran sampai dengan akhir Juli 2023, terdapat surplus sebesar Rp153,51 triliun (0,73 persen dari PDB). Realisasi surplus tersebut disebabkan oleh Pendapatan Negara dan Hibah hingga akhir Juli 2023 mencapai Rp1.614,75 triliun, sedangkan Belanja Negara mencapai Rp1.461,24 triliun. Sementara itu, realisasi Pembiayaan Anggaran hingga akhir Juli 2023 mencapai Rp163,93 triliun (27,40 persen terhadap Pagu). Realisasi Pembiayaan tersebut didominasi oleh Pembiayaan Utang sebesar Rp194,93 triliun (28 persen terhadap Pagu) yang terdiri atas realisasi Surat Berharga Negara (Neto)

sebesar Rp184,05 triliun dan Pinjaman (Neto) sebesar Rp10,88 triliun yang berasal dari Pinjaman Dalam Negeri (Neto) sebesar Rp3,60 triliun dan Pinjaman Luar Negeri (Neto) sebesar Rp7,28 triliun.

Hingga akhir Juli 2023, Pemerintah melakukan Penarikan Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp4,60 triliun dan membayar Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri sebesar negatif Rp998,3 miliar. Di sisi lain, Pemerintah juga melakukan Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) sebesar Rp52,53 triliun dan membayar Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri sebesar negatif Rp45,25 triliun. Di samping Pembiayaan Utang, Pemerintah juga mengalokasikan Anggaran Pembiayaan untuk Investasi sebesar negatif Rp33,22 triliun yang digunakan untuk Investasi Pemerintah sebesar negatif Rp12,00 triliun, Investasi kepada BLU sebesar negatif Rp27 triliun dan memperoleh Penerimaan Kembali dari Investasi sebesar Rp5,78 triliun. Pemerintah juga memberikan Pinjaman sebesar Rp1,99 triliun dan merealisasikan Anggaran untuk Pembiayaan Lainnya sebesar Rp229,60 miliar.

Perkembangan
Ekonomi Makro



Perkembangan Ekonomi Makro

Ekonomi nasional pada kuartal II 2023 mampu tumbuh tinggi di atas level kuartal sebelumnya. Produk Domestik Bruto kuartal II 2023 tumbuh sebesar 5,17 persen (*yoy*) didorong oleh pertumbuhan komponen pengeluaran dari konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 10,62 persen (*yoy*). Dari sisi produksi, sektor transportasi tumbuh paling tinggi yakni sebesar 15,28 persen (*yoy*). Perkembangan ekonomi nasional didorong oleh perkembangan ekonomi secara merata di seluruh wilayah. Pengembangan

industri hilirisasi SDA mendorong pertumbuhan yang kuat di beberapa wilayah. Perkembangan indikator ekonomi di awal kuartal III memperlihatkan bahwa aktivitas sektor manufaktur secara konsisten terus mengalami ekspansi dalam 23 bulan berturut-turut yang ditunjukkan oleh *Purchasing Managers' Index* (PMI) Manufaktur di Juli 2023 pada level 53,3. Penguatan aktivitas manufaktur nasional didorong oleh meningkatnya permintaan dari domestik dan ekspor. Keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi masih tetap

kuat yang ditunjukkan oleh Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 123,5 di Juli 2023.

Stabilitas pasar keuangan nasional tetap terjaga, namun tetap harus waspada terhadap risiko tekanan keuangan global. Pasar saham domestik masih tetap kuat dimana IHSG tercatat pada level 6.910,17 pada 14 Agustus 2023. Pergerakan nilai tukar Rupiah di awal Agustus 2023 masih mengalami apresiasi dibandingkan posisi awal tahun. Nilai tukar Rupiah mengacu pada Kurs Tengah Transaksi Bank Indonesia tercatat sebesar Rp15.225 per USD pada 14 Agustus 2023. Sehingga, rata-rata nilai tukar Rupiah tercatat sebesar Rp15.073 per USD hingga 14 Agustus 2023, atau mengalami apresiasi sebesar 2,4 persen dibandingkan nilai tukar Rupiah di awal tahun 2023. Inflasi Juli 2023 terus melanjutkan tren menurun dan tercatat 3,08 persen (yoy) menurun dari Juni 2023 sebesar 3,52 persen (yoy), dipengaruhi perlambatan pada seluruh komponen. Pemerintah terus konsisten dalam merespons dan mengantisipasi kenaikan harga dengan berbagai upaya stabilisasi, terutama melalui koordinasi pusat dan daerah. Posisi cadangan devisa nasional terus berada pada posisi yang kuat dalam

menopang daya tahan ekonomi nasional terhadap guncangan eksternal. Posisi cadangan devisa Indonesia per akhir Juli 2023 meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, tercatat sebesar USD137,7 miliar.

Wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Indonesia terus meningkat. Kondisi ini menandakan bahwa sektor pariwisata nasional terus mengalami kenaikan dan akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan sektor terkait lainnya. Peningkatan aktivitas sektor pariwisata secara langsung akan mendorong aktivitas sektor pendukung seperti makanan dan akomodasi, hotel, transportasi, serta perdagangan. Kunjungan wisman ke Indonesia pada Juni 2023 mencapai 1,06 juta kunjungan, naik 119,64 persen (yoy). Wisman yang berkunjung ke Indonesia pada Juni 2023 didominasi oleh wisman yang berasal dari Singapura (16,41 persen), Malaysia (15,88 persen), dan Australia (12,47 persen). Secara kumulatif, jumlah kunjungan wisman selama Semester I tahun 2023 tercatat sebesar 5,19 juta kunjungan. Demikian pula dengan kondisi Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang di Indonesia pada Juni 2023 tercatat 53,67 persen, naik 3,39 poin (yoy).

Halaman Ini Dikосongkan

Postur APBN



Postur APBN

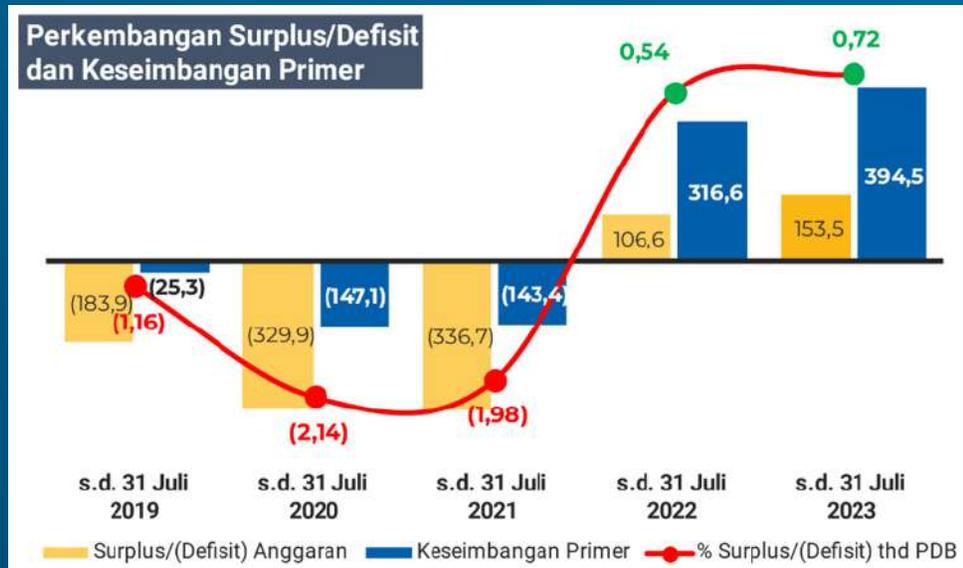
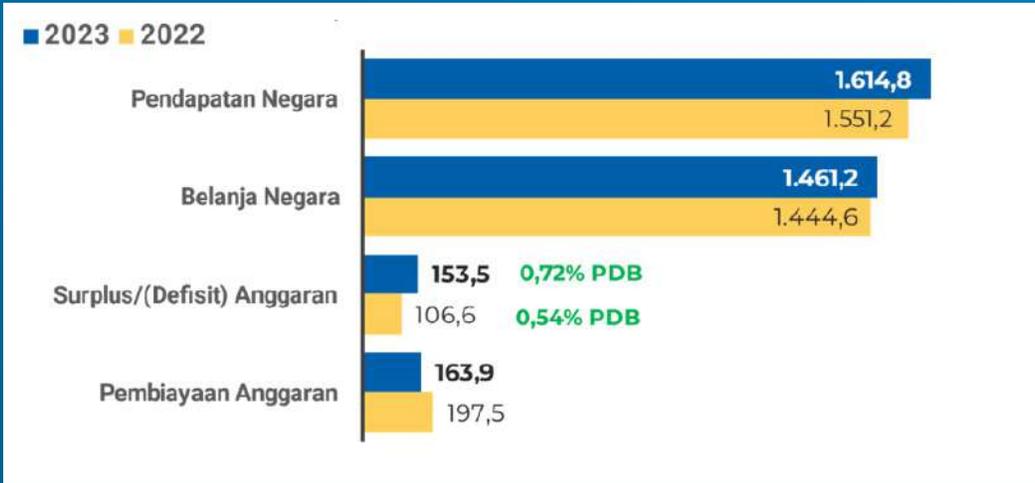
Sampai dengan 31 Juli 2023, APBN surplus sebesar 0,72 persen terhadap PDB (periode yang sama di tahun 2022 surplus APBN sebesar 0,54 persen terhadap PDB).

Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp1.614,75 triliun atau meningkat 4,10 persen (yoy). Di sisi lain, realisasi Belanja Negara mencapai Rp1.461,24 triliun atau meningkat 1,15 persen (yoy).

Realisasi Pendapatan Negara yang telah mencapai 65,56 persen dari Target, terdiri atas:

Realisasi Penerimaan Perpajakan mencapai Rp1.258,88 triliun atau 62,28 persen dari Target, tumbuh 3,73 persen (yoy), terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp1.109,10 triliun (64,56 persen dari Target), tumbuh 7,84 persen (yoy) serta Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp149,78 triliun (49,40 persen dari Target), turun 19,07 persen (yoy).

Realisasi APBN per 31 Juli 2023



Realisasi PNBPN telah mencapai Rp355,55 triliun (80,55 persen dari Target), tumbuh 5,41 persen (yoy).

Penerimaan Hibah telah terealisasi sebesar Rp325,16 miliar, lebih rendah dari realisasi pada periode yang sama tahun 2022 yang mencapai Rp345,28 miliar.

Realisasi Belanja Negara yang telah mencapai 47,73 persen dari Pagu, terdiri atas:

Realisasi BPP sebesar Rp1.020,35 triliun (45,42 persen dari Pagu). Realisasi tersebut terdiri dari realisasi Belanja K/L sebesar Rp492,98 triliun (49,26 persen dari Pagu), tumbuh 0,47 persen (yoy) dan

realisasi Belanja non-K/L sebesar Rp527,37 triliun (42,34 persen dari Pagu).

Realisasi TKD telah mencapai Rp440,89 triliun (54,12 persen dari alokasi), tumbuh 6,60 persen (yoy).

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Belanja Negara tersebut, sampai dengan 31 Juli 2023, APBN mencatatkan surplus sebesar Rp153,51 triliun (0,72 persen terhadap PDB) dan surplus keseimbangan primer sebesar Rp394,47 triliun. Sementara itu, realisasi Pembiayaan Anggaran telah mencapai Rp163,93 triliun (27,41 persen dari Target).

Realisasi APBN s.d. 31 Juli, 2022-2023

APBN (triliun rupiah)	2022				2023			
	Perpres 98/2022	Realisasi s.d. 31 Juli	% thd Perpres 98/2022	Growth (%)	APBN	Realisasi s.d. 31 Juli	% thd APBN	Growth (%)
A. Pendapatan Negara	2.266,20	1.551,19	68,45	50,36	2.463,02	1.614,75	65,56	4,10
I. Pendapatan Dalam Negeri	2.265,62	1.550,85	68,45	50,39	2.462,62	1.614,43	65,56	4,10
1. Penerimaan Perpajakan	1.783,99	1.213,56	68,03	53,83	2.021,22	1.258,88	62,28	3,73
a. Pajak	1.484,96	1.028,50	69,26	58,79	1.718,03	1.109,10	64,56	7,84
b. Kepabeanan dan Cukai	299,03	185,07	61,89	31,06	303,19	149,78	49,40	(19,07)
2. PNBPN	481,63	337,28	70,03	39,21	441,39	355,55	80,55	5,41
II. Penerimaan Hibah	0,58	0,35	59,55	(26,42)	0,41	0,33	79,42	(5,83)
B. Belanja Negara	3.106,43	1.444,62	46,50	5,57	3.061,18	1.461,24	47,73	1,15
I. Belanja Pemerintah Pusat	2.301,64	1.031,02	44,79	8,21	2.246,46	1.020,35	45,42	(1,03)
1. Belanja K/L	945,75	490,66	51,88	(10,66)	1.000,84	492,98	49,26	0,47
2. Belanja Non K/L	1.355,89	540,36	39,85	33,87	1.245,61	527,37	42,34	(2,40)
II. Transfer Ke Daerah	804,78	413,60	51,39	(0,46)	814,72	440,89	54,12	6,60
C. Keseimbangan Primer	(434,36)	316,60	(72,89)	320,71	(156,75)	394,47	(251,65)	24,59
D. Surplus/(Defisit) Anggaran	(840,23)	106,58	(12,68)	131,65	(598,15)	153,51	(25,66)	44,04
% Surplus/(Defisit) thd PDB	(4,50)	0,54			(2,84)	0,72		
E. Pembiayaan Anggaran	840,23	197,54	23,51	(56,03)	598,15	163,93	27,41	(17,01)

Konsolidasi LKPP dan LKPD untuk Informasi Fiskal Nasional yang Sinergis

Mengelola keuangan negara yang dilaksanakan melalui APBN dan APBD merupakan ibarat permainan Bakiak. Langkah sandal di kaki kanan dan kiri ibarat keseimbangan dan keselarasan antara APBN dan APBD dalam mewujudkan Indonesia yang adil dan Makmur sesuai amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Konsistensi terhadap regulasi dan standar ditambah dengan transparansi kepada masyarakat diyakini

membawa Indonesia segera menjadi 'Juara', ditambah raihan predikat opini atas laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban dari masing-masing entitas pelaporan.

Bicara pertanggungjawaban, pada tahun 2022 Pemerintah Pusat melalui Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pun begitu, dari sisi

Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) juga sebagian besar Pemda sudah mendapatkan opini WTP. *Raport* biru tersebut menjadi bukti bahwa respon keuangan negara terhadap kondisi pandemi dan pemulihan ekonominya tetap tidak meninggalkan sisi akuntabilitas.

Namun, *raport* biru tersebut biarkan menjadi modal awal untuk Pemerintah senantiasa meningkatkan kewajiban dalam menyediakan informasi keuangan yang seutuhnya kepada masyarakat selaku pemilik mandat kedaulatan. Langkah Pemerintah tersebut diwujudkan dalam konsolidasi LKPP dan LKPD agar aktivitas Pemerintah secara keseluruhan dapat dipotret lebih utuh dan analisis terhadap kebijakan fiskal dapat dilakukan dengan komprehensif. Konsolidasi LKPP dan LKPD merupakan inisiatif Kementerian Keuangan yang tidak lelah dalam memberikan dedikasi demi kesempurnaan tugas suci mengawal keuangan negara.

Pengelolaan keuangan negara disesuaikan dengan sistem pemerintahan yang menganut desentralisasi. Masing-masing tingkatan pemerintahan mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, hingga Pemerintah Kabupaten/

Kota menyusun laporan keuangan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang, dengan berpijak pada empat unsur penting yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas Sistem Pengendalian Internal, kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap Perundang-undangan. Laporan Keuangan yang dihasilkan tersebut tentulah meng-*capture* pengelolaan keuangan di masing-masing tingkatan secara parsial. Untuk dapat melihat fungsi Pemerintahan secara utuh, laporan keuangan antar entitas tersebut perlu dikonsolidasikan. Konsolidasi laporan keuangan antar entitas pelaporan (antar unit pemerintahan) tentu saja bukan untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban, namun lebih ke arah kebutuhan manajerial. Dalam rangka penyajian informasi keuangan dimaksud, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan menjadi otoritas yang bertanggungjawab dalam menyediakan informasi konsolidasian antara LKPP dan seluruh LKPD yang kemudian dapat diakses oleh masyarakat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK).

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian disusun

menggunakan kaidah akuntansi, dimana Pemerintah Pusat (Pempus) dan Pemda sama-sama mengacu kepada SAP yang sama. Namun, walaupun mengacu kepada SAP, realitanya sistem akuntansi antara Pempus dan masing-masing Pemda berbeda-beda. Padahal, Sistem Akuntansi dapat diibaratkan layaknya seperti *backbone* dalam penyusunan laporan keuangan. Dapat dibayangkan apabila kemudian *backbone* tersebut berbeda-beda dan tidak dikonsolidasikan maka gambaran akan *body* Pemerintah secara utuh tentu akan sulit terwujud. Proses penyusunan LKPK dilaksanakan melalui tahap konsolidasi akuntansi antara LKPP dan LKPKD. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat disusun oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Sedangkan, LKPKD merupakan laporan keuangan yang dihasilkan dari konsolidasi seluruh 542 Pemerintahan Daerah yang ada di Indonesia dan telah membuat LKPD Tahun 2022.

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian menyediakan data fiskal yang terkonsolidasi antara Pempus dan Pemda.

Guna mencapai tujuan tersebut, penyusunan LKPK ini dibuat dengan menyajikan arus transaksi yang diwujudkan dalam laporan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan serta menyajikan posisi keuangan atas aset, kewajiban dan ekuitas yang dimiliki secara konsolidasian Pempus dan Pemda.

Gambaran umum kondisi fiskal Pemerintah Indonesia terkonsolidasi pada tahun 2022 menggunakan data Sementara (unaudited) sebagai berikut: Pendapatan dan Hibah Konsolidasian tahun 2022 mencapai Rp2.971,53 triliun (setelah eliminasi) yang merupakan konsolidasi pendapatan negara dan hibah Pemerintah Pusat sebesar Rp2.635,83 triliun dan pendapatan Pemerintah Daerah Konsolidasian sebesar Rp 344,11 triliun. Pendapatan Konsolidasian tersebut terdiri dari Pendapatan Perpajakan, Pendapatan Negara Bukan Pajak, dan Pendapatan Hibah secara konsolidasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sedangkan pendapatan transfer Pemerintah Daerah dieliminasi dengan Belanja transfer Pemerintah Pusat. Pendapatan dan Hibah Konsolidasian tahun 2022 didominasi oleh Pendapatan Perpajakan Konsolidasian

sebesar 76,33 persen, yang diikuti dengan Pendapatan Bukan Pajak Konsolidasian sebesar 23,25 persen dan Pendapatan Hibah Konsolidasian sebesar 0,42 persen dari total Pendapatan dan Hibah Konsolidasian. Pendapatan perpajakan yang dominan menunjukkan pentingnya peran serta masyarakat dalam mendukung sumber pendanaan APBN dan APBD. Perpajakan Konsolidasian TA 2022 meningkat sebesar 30,18 persen dibandingkan TA 2021. Adanya peningkatan terhadap Pendapatan Perpajakan menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menjaga pertumbuhan perekonomian nasional secara positif sehingga mendorong peningkatan konsumsi domestik yang baik dan peningkatan aktivitas perdagangan internasional.

Belanja dan Transfer Konsolidasian tahun 2022 sebesar Rp3.406,56 triliun terdiri dari konsolidasi Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp3.096,26 triliun dan Belanja dan Transfer Pemerintah Daerah sebesar Rp1.134,94 triliun setelah dikurangi dengan eliminasi sebesar Rp824,64 triliun. Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat berkontribusi 73,18 persen dari total Belanja dan Transfer Pemerintah

Konsolidasian, sedangkan Belanja dan Transfer Pemerintah Daerah berkontribusi sebesar 26,82 persen. Belanja dan Transfer Konsolidasian tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini sejalan dengan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional yang membutuhkan pendanaan besar. Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa merupakan instrumen penting bagi pelaksanaan desentralisasi fiskal, untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip desentralisasi fiskal yang dianut oleh Pemerintah adalah mengurangi *vertical fiscal imbalance* dan *horizontal fiscal imbalance*, meningkatkan kualitas pelayanan dan mengurangi *gap* pelayanan publik antar daerah, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya nasional, penegakan tata kelola yang baik dalam pelaksanaan alokasi transfer ke daerah, dan mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi secara makro.

Pada tahun 2022, Pemerintah Konsolidasian mengalami defisit konsolidasian sebesar Rp435,02 triliun yang menunjukkan geliat Pemerintah untuk terus memastikan peranannya sebagai

pendorong perekonomian Indonesia. Defisit konsolidasian tahun 2022 menurun jika dibandingkan dengan defisit konsolidasian tahun 2021 yakni sebesar Rp752,12 triliun. Penurunan tersebut sebuah hasil kerja keras Pemerintah yang bersungguh-sungguh untuk terus menekan defisit namun di sisi lain tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi. Pembiayaan Konsolidasian tahun 2022 adalah Rp712,21 triliun terdiri dari Pembiayaan Dalam Negeri Konsolidasian sebesar Rp684,00 triliun dan Pembiayaan Luar Negeri Konsolidasian sebesar Rp27,22 triliun. Pembiayaan yang cukup besar merupakan konsekuensi atas kebijakan Pemerintah yang berperan sebagai *shock absorber* untuk meredam guncangan ekonomi setelah tahun 2020 perekonomian global dihantam pandemi Covid-19 lalu awal tahun 2022 terjadi perang Rusia vs Ukraina yang kemudian membuat gejolak rantai ekonomi dan pada akhirnya menimbulkan risiko ketidakpastian ditengah usaha Pemerintah menjaga momentum pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Aset Konsolidasian per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp15.470,74 triliun meningkat jika dibandingkan dengan total Aset Konsolidasian

per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.070,56 triliun. Di lihat dari sisi kepemilikan, sebagian besar komponen aset konsolidasian dimiliki oleh Pemerintah Pusat dibandingkan dengan Pemerintah Daerah. Aset Konsolidasian terdiri atas berbagai macam jenis aset, namun komposisi terbesar didominasi oleh Aset Tetap yaitu sebesar Rp9.420,60 triliun atau 60,89 persen dari Total Aset Konsolidasian. Aset Konsolidasian terbesar selanjutnya adalah Investasi Jangka Panjang Konsolidasian sebesar Rp3.992,35 triliun. Dominasi atas kepemilikan kedua jenis aset ini, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kewajiban Konsolidasian per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp8.880,56 triliun meningkat jika dibandingkan dengan Kewajiban Konsolidasian per 31 Desember 2021 sebesar Rp7.562,62 triliun. Sebagian besar Kewajiban Konsolidasian didominasi oleh Kewajiban pada Pemerintah Pusat. Kewajiban ini terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp864,78 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang Konsolidasian sebesar Rp8.015,79 triliun. Lebih besarnya nilai kewajiban jangka panjang diharapkan tidak mengganggu *cash flow* jangka pendek sehingga masih ada

ruang fiskal bagi pemerintah untuk menganggarkan kegiatan kegiatan produktif. Ekuitas Konsolidasian per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.590,18 triliun terdiri dari Ekuitas Pemerintah Pusat sebesar Rp3.404,89 triliun dan Ekuitas Pemerintah Daerah sebesar Rp3.185,28 triliun. Pada tahun 2022, ekuitas konsolidasian mengalami penurunan sebesar Rp247,39 triliun atau minus 3,62 persen dibandingkan dengan Ekuitas per 31 Desember 2022.

Peranan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah secara konsolidasian pada tahun 2022 membuahkan hasil yang baik. Prestasi tersebut terlihat dari sisi indikator ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 5,31 persen yang salah satunya didorong oleh efektivitas transmisi fiskal. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2022 juga menurun dari 6,49 persen pada tahun 2021 menjadi 5,86 persen. Sejalan, angka kemiskinan juga menurun dari tahun 2021 sebesar 9,71 persen menjadi 9,57 persen pada tahun 2022. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 72,91 persen dari tahun 2021 sebesar 72,29 persen. Berbagai capaian diatas turut menopang Indonesia naik kelas

menjadi negara berpendapatan menengah.

Selain LKPK, konsolidasi informasi keuangan antara LKPP dan LKPD juga diolah menjadi Laporan *Government Finance Statistics* (GFS) atau Statistik Keuangan Pemerintah. GFS juga diproduksi dari data LKPP dan LKPD yang kemudian disebut sebagai statistik keuangan pemerintah sektor pemerintah umum. Perbedaan antara LKPK dan GFS salah satunya terletak pada kebijakan dalam konsolidasi dan sistem penyusunannya. Jika LKPK berdasarkan pada kaidah akuntansi, maka GFS mengacu pada GFS Manual 2014 atau berbasis statistik ekonomi makro yang sejalan dengan *System of National Account* (SNA) 2008. Statistik Keuangan Pemerintah juga berperan sebagai jembatan untuk menerjemahkan informasi akuntansi dalam laporan keuangan ke dalam 'bahasa' yang lebih dimengerti dan sejalan dengan sistem statistik makro ekonomi. Konsolidasi Fiskal dan Statistik Keuangan Pemerintah ini bermanfaat dalam menyediakan informasi fiskal dan keuangan yang lebih komprehensif *tools* alternatif pimpinan dalam pengambilan kebijakan fiskal, memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas pemerintahan, dan

sekaligus *assessment* penilaian kinerja fiskal pemerintah.

Dengan menjaga keseimbangan antara optimisnya APBN dan APBD dengan akuntabilitasnya, maka pengelolaan keuangan negara akan efektif dan transparan. Konsistensi akan hal tersebut bukan tidak mungkin menjadi salah satu faktor pendorong dengan stabilnya peringkat Indonesia dalam posisi *Investment Grade*. Layaknya Bakiak, capaian tersebut ibarat kuatnya pijakan yang disambung dengan kekompakan menjadi satu dalam akselerasi terwujudnya cita-cita menjadi Indonesia Maju.

Regulasi Penyusutan dan Amortisasi Melalui PMK Nomor 72 Tahun 2023

Pada akhir tahun 2022, terbit PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang PPh. Salah satu regulasinya adalah terdapat pilihan bagi wajib pajak dalam melakukan penyusutan bangunan permanen yang mempunyai masa manfaat lebih dari 20 tahun untuk melakukan penyusutan dengan masa manfaat 20 tahun atau sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan wajib pajak. Perlakuan penyusutan ini harus dilakukan secara taat asas.

Apabila bangunan permanen yang mempunyai masa manfaat lebih dari 20 tahun tersebut telah dimiliki dan digunakan sebelum tahun pajak 2022, serta telah disusutkan menggunakan metode garis lurus dengan perhitungan masa manfaat 20 tahun, maka wajib pajak dapat memilih melakukan penyusutan sesuai masa yang sebenarnya berdasarkan pembukuan dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat akhir Tahun Pajak 2022.



Selain regulasi tersebut, terdapat pula pilihan bagi wajib pajak dalam melakukan amortisasi atas harta tak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 20 tahun, yaitu diamortisasi dengan masa manfaat sesuai harta tak berwujud kelompok 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 IA ayat (2) UU PPh atau sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan wajib pajak. Perlakuan amortisasi ini juga harus dilakukan secara taat asas.

Dalam hal wajib pajak telah melakukan amortisasi harta tak berwujud yang dimiliki sebelum tahun pajak 2022 dan telah menggunakan

masa manfaat sesuai harta tak berwujud kelompok 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 IA ayat (2) UU PPh, maka wajib pajak dapat memilih melakukan amortisasi sesuai masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan wajib pajak dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat akhir tahun pajak 2022.

Selanjutnya, terbit aturan turunan yang mengatur kedua regulasi ini melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2023 pada 13 Juli 2023. Dalam hal wajib pajak memilih untuk melakukan penyusutan atau amortisasi dengan masa manfaat yang

sebenarnya berdasarkan pembukuan wajib pajak namun belum menyampaikan hingga akhir tahun pajak 2022, wajib pajak dapat menyampaikan pemberitahuan paling lambat 30 April 2024.

Tata Cara Pemberitahuan

Wajib Pajak berstatus Pusat yang memilih melakukan penyusutan harta berwujud dan/atau amortisasi harta tak berwujud sesuai masa manfaat yang sebenarnya menyampaikan pemberitahuan secara elektronik dan disampaikan melalui aplikasi atau sistem yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam hal aplikasi atau sistem tersebut tidak dapat diakses, pemberitahuan dapat disampaikan secara tertulis melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak berstatus Pusat terdaftar. Pemberitahuan tersebut disampaikan secara langsung, melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Pemberitahuan dengan memilih melakukan penyusutan sesuai masa manfaat yang sebenarnya paling sedikit memuat:

- a. identitas Wajib Pajak;
- b. nama harta berwujud;
- c. tanggal perolehan atau selesainya pengerjaan;
- d. nilai perolehan;
- e. masa manfaat menurut Wajib Pajak; dan
- f. lokasi bangunan.

Pemberitahuan dengan memilih melakukan amortisasi sesuai masa manfaat yang sebenarnya paling sedikit memuat:

- a. identitas Wajib Pajak;
- b. nama harta tak berwujud;
- c. tanggal perolehan atau selesainya pengerjaan;
- d. nilai perolehan;
- e. masa manfaat menurut Wajib Pajak; dan
- f. asal perolehan harta.

Bagi wajib pajak yang telah menyampaikan pemberitahuan dan memenuhi ketentuan batas waktu penyampaian, penghitungan penyusutan bangunan permanen mulai tahun pajak 2022 dilakukan dalam bagian yang sama besar selama sisa masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan wajib pajak berdasarkan nilai sisa buku fiskal pada akhir tahun pajak 2021.

Sedangkan untuk penghitungan amortisasi harta tak berwujud mulai tahun pajak 2022 dilakukan menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun selama sisa masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan wajib pajak sesuai nilai sisa buku fiskal pada akhir tahun pajak 2021.

Pengaturan ini bertujuan untuk lebih memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemudahan bagi wajib pajak dalam menghitung penyusutan harta berwujud dan/atau amortisasi harta tak berwujud untuk keperluan perpajakan serta selaras dengan program simplifikasi regulasi.

Aturan Baru NPPBKC, Apa Saja yang Disempurnakan Bea Cukai?

Jakarta, 01-08-2023 - Untuk meningkatkan pelayanan dan kepastian hukum di bidang cukai, Kementerian Keuangan menerbitkan PMK Nomor 68/PMK.04/2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Aturan yang ditetapkan per tanggal 12 Juli 2023 ini mulai berlaku pada tanggal

1 Agustus 2023 dan selaras dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) terkait dengan pengaturan barang kena cukai (BKC) rokok elektrik.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan, Encep Dudi Ginanjar, pada Senin (31/07) menjelaskan beberapa pokok pengaturan PMK ini, yang juga menyempurnakan PMK Nomor 66/PMK.04/2018. "Perubahan dalam PMK ini ialah pada ketentuan luas pabrik hasil



tembakau rokok elektrik. Semula, ketentuan luas pabrik rokok elektrik mengikuti ketentuan hasil tembakau berupa Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL), yaitu dikecualikan dari paling sedikit memiliki luas 200 meter persegi. Namun pada aturan baru, ketentuan luas pabrik rokok elektrik mengikuti ketentuan hasil tembakau secara umum, yaitu paling sedikit memiliki luas 200 meter persegi," rincinya.

Kemudian, PMK ini juga mengatur pemaparan proses bisnis yang dilakukan oleh pemilik atau penanggung jawab perusahaan. Pemaparan tersebut ditujukan untuk mengetahui pemahaman dan kesesuaian pemilik atau penanggung jawab perusahaan

dan dilaksanakan sesuai tanggal yang tercantum pada surat kesiapan pemaparan proses bisnis.

Hal lain yang diatur dalam PMK ini ialah perubahan penomoran NPPBKC dan perpanjangan NPPBKC penyalur dan pengusaha tempat penjualan eceran (TPE). Penomoran NPPBKC menggunakan NPWP sebagai bentuk penerapan *single identity*. Selain diberikan NPWP, pengusaha BKC juga diberikan nomor identitas lokasi kegiatan usaha (NILKU). Adapun untuk perpanjangan NPPBKC harus diajukan sebelum masa berlaku berakhir. Permohonan perpanjangan dapat diajukan paling cepat dua bulan sebelum masa berlaku NPPBKC berakhir dan paling lambat sampai dengan sebelum masa berlaku NPPBKC berakhir.

Selanjutnya, berkaitan dengan sarana dan prasarana, PMK Nomor 68/PMK.04/2023 mengatur bahwa Kepala Kantor Bea dan Cukai, berdasarkan manajemen risiko, dapat meminta kepada pengusaha BKC, untuk menyediakan sarana dan prasarana. "Pengusaha BKC wajib menyediakan sarana dan prasarana, seperti ruang kerja, CCTV *online* dan *realtime*, serta alat ukur untuk mengetahui jumlah bahan baku dan barang, paling lama 6 bulan sejak diterimanya permintaan Kepala Kantor Bea dan Cukai. Jika tidak, NPPBKC dibekukan paling lama 90 hari," imbuh Encep.

Terakhir, untuk monitoring dan evaluasi, PMK ini menetapkan siapa saja yang berwenang melaksanakan monitoring dan evaluasi beserta tugas dan ruang lingkupnya. "Monitoring dan evaluasi merupakan rangkaian aktivitas dalam rangka mereviu, memantau, dan mengevaluasi pengusaha BKC yang mendapatkan NPPBKC atas pemenuhan persyaratan dan ketentuan NPPBKC. Kegiatan tersebut dapat berupa penelitian administrasi dan pemeriksaan lapangan, baik oleh Direktur Cukai, Kepala Kantor Wilayah, maupun Kepala Kantor Pelayanan Bea Cukai," jelas Encep.

Ia pun menegaskan bahwa terbitnya PMK ini merupakan wujud komitmen Bea Cukai untuk secara kontinu melakukan perbaikan kinerja, termasuk melalui regulasi yang dapat meningkatkan pelayanan dan kepastian hukum di bidang cukai. "Kami pun berharap masyarakat, khususnya para pelaku usaha di bidang cukai, terus mendukung proses implementasi kebijakan ini dan dapat menjalin kerja sama yang baik dengan pemerintah untuk mewujudkan iklim usaha yang baik, ketertiban masyarakat, dan peningkatan penerimaan negara dari sektor cukai," tutup Encep.

Lakukan Ribuan Kali Penindakan, Simak Hasil Lengkap Operasi Gempur Rokok Ilegal 2023

Jakarta, 07-08-2023 – Sebagai langkah represif penanganan peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal khususnya hasil tembakau (HT), Bea Cukai kembali menggelar Operasi Gempur Rokok Ilegal di tahun 2023. Telah dilaksanakan pada periode 15 Mei-1 Juli 2023 lalu, operasi ini pun berhasil menindak lebih dari seratus juta batang rokok ilegal dalam ribuan penindakan yang tersebar di berbagai wilayah.

Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar mengatakan Operasi Gempur Rokok Ilegal merupakan bentuk perang terhadap rokok ilegal. “Peredaran rokok ilegal tidak hanya membahayakan masyarakat, tetapi juga mengancam stabilitas perekonomian Indonesia,” tegasnya.

Encep menjabarkan, bahwa Operasi Gempur Rokok Ilegal telah digelar serentak di



seluruh wilayah Indonesia dengan menysasar ke toko-toko, pengusaha jasa kiriman, hingga modus-modus peredaran dan distribusi rokok ilegal lainnya. "Hasilnya, dalam operasi ini Bea Cukai mampu melakukan 3299 penindakan dan menyita sebanyak 111.200.000 batang rokok ilegal berbagai merek. Selain rokok ilegal, Bea Cukai juga berhasil menindak sebanyak 49.000 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dalam 271 penindakan."

Selain hasil tersebut, Bea Cukai juga mencatatkan hasil baik dalam operasi pengawasan peredaran BKC HT ilegal hingga pertengahan Juli 2023.

Sebanyak 10.015 penindakan berhasil dilakukan dengan menyita lebih dari 400 juta batang rokok ilegal. Hasil ini meningkat jika dibandingkan rata-rata jumlah penindakan dalam tiga tahun terakhir.

"Kami sampaikan apresiasi dan terima kasih, hasil baik ini tercapai berkat sinergi dan kerja sama positif antara Bea Cukai dengan berbagai pihak terkait, seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Pemerintah Daerah, dan masyarakat," ujar Encep.

Apresiasi pun diberikan Bea Cukai kepada para pelaku usaha yang taat dalam

menjalankan usahanya. Bea Cukai akan terus berupaya menciptakan *level of playing field* salah satunya melalui pelaksanaan Operasi Gempur Rokok Ilegal. “Kami juga menyediakan berbagai fasilitas fiskal di bidang cukai sebagai bagian sebagai *extra services* bagi pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya secara legal,” terang Encep.

“Kami mengajak masyarakat dan seluruh pihak untuk ikut memerangi rokok ilegal dengan tidak membeli dan mengedarkannya. Namun jika menemukan indikasi adanya peredaran rokok ilegal, segera laporan secara langsung ke kantor Bea Cukai terdekat atau melalui pusat kontak layanan Bravo Bea Cukai di 1500225,” pungkasnya.

S&P dan R&I Beri Kabar Baik tentang Peringkat Utang Pemerintah Indonesia

Kabar baik datang dari dua lembaga pemeringkat kredit internasional.

Baru-baru ini Pemerintah mendapatkan apresiasi salah satunya dalam hal pengelolaan utangnya. Pertama, pengakuan diberikan oleh lembaga pemeringkat *Standard and Poor's Global Ratings* (S&P) pada tanggal 4 Juli 2023 yang mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada posisi BBB dengan *outlook* stabil. Selanjutnya,

pada tanggal 25 Juli 2023 giliran lembaga pemeringkat *Rating and Investment Information, Inc.* (R&I) yang tidak hanya mempertahankan peringkat kredit pada posisi BBB+, namun juga dengan meningkatkan *outlook* dari stabil menjadi positif.

Keputusan dari kedua lembaga pemeringkat tersebut menunjukkan bahwa Indonesia berhasil mencapai konsolidasi fiskal yang cepat di tengah tantangan ketidakpastian global, didukung oleh

Perbandingan Defisit Fiskal dan Delta *Debt Ratio* 2019 s.d 2022 (% GDP)



Sumber: Kemenkeu

pertumbuhan pendapatan yang solid dan kebijakan yang terkalibrasi dengan baik, serta pertumbuhan ekonomi dan kondisi eksternal yang stabil setelah pemulihan negara ini dari pandemi.

Lembaga pemeringkat S&P melihat adanya perbaikan yang signifikan dalam kondisi fiskal Indonesia. Hal ini didorong oleh beberapa faktor positif, termasuk kenaikan harga komoditas yang menguntungkan, kondisi ekonomi domestik yang semakin membaik, serta komitmen yang kuat terhadap pelaksanaan kebijakan fiskal yang berkelanjutan. Perbaikan defisit fiskal juga berdampak positif pada rasio utang Pemerintah terhadap PDB, menunjukkan kredibilitas dan kestabilan ekonomi Indonesia.

Secara lebih detail, S&P menilai PDB riil Indonesia tumbuh di level tertinggi, mencapai 5,3 persen pada tahun 2022 sebagai dampak dari peningkatan permintaan luar negeri terhadap komoditas utama serta upaya dalam mengembangkan perekonomian domestik. Pemerintah Indonesia juga dinilai telah berhasil mengendalikan defisit fiskal, di bawah 3 persen dari PDB yang mampu diturunkan signifikan menjadi 2,4 persen di tahun 2022. Dalam penilaian S&P pada tahun 2023, defisit fiskal menjadi sekitar 2,3 persen dari PDB. Hal ini memberikan dampak positif dalam mengurangi beban utang pemerintah dan pembayaran bunga.

Untuk R&I, lembaga rating ini menilai Pemerintah Indonesia telah membuat kemajuan signifikan dalam mengatasi

tantangan fiskal, berada di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan PDB Indonesia mencapai 5,3 persen pada tahun 2022, dipengaruhi antara lain peningkatan ekspor, serta pemulihan konsumsi swasta dan investasi. *Rating and Investment Information, Inc.* memproyeksikan pertumbuhan PDB riil Indonesia akan tetap stabil di sekitar 5 persen mulai tahun 2024, meskipun diperkirakan pada paruh kedua tahun 2023 pertumbuhan ekonomi akan melambat sebagai akibat pelemahan permintaan eksternal dan sikap hati-hati dari para investor jelang pelaksanaan pemilu.

Perubahan *outlook* menjadi positif dari R&I didasarkan pada beberapa faktor kunci yang menunjukkan stabilitas ekonomi negara dan prospek pertumbuhan yang baik. Terutama, Indonesia berhasil mencapai stabilitas harga, dengan tingkat inflasi yang berada dalam target bank sentral pada tahun 2023. Keberhasilan ini diperoleh berkat kerja sama pemerintah dan bank sentral untuk mengatasi volatilitas harga pangan. R&I percaya bahwa stabilitas harga akan terus terjaga di masa mendatang.

Pemerintah Indonesia mempunyai kesempatan untuk mendapatkan peningkatan

peringkat kredit dari R&I, apabila paket kebijakan ekonomi yang telah disiapkan, termasuk reformasi di sektor cipta kerja dan sektor keuangan, berhasil meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri dalam negeri. Selain itu, pemerintahan baru yang terbentuk selanjutnya diharapkan masih melanjutkan kebijakan tersebut dengan kondisi perekonomian yang tetap stabil.

Meskipun Indonesia dalam perjalanan menuju peningkatan peringkat dari R&I, namun masih terdapat tantangan seperti masih terbatasnya basis penerimaan negara. Namun diyakini dengan perbaikan kebijakan fiskal dan reformasi struktural berkelanjutan, basis penerimaan dapat ditingkatkan sehingga mampu mendorong peringkat kredit Indonesia di masa depan.

Keputusan peringkat kredit Indonesia dari dua lembaga tersebut merupakan bentuk prestasi yang patut dibanggakan karena di tengah gejolak kondisi global saat ini tidak semua negara dapat mempertahankan peringkat kredit bahkan peningkatan *outlook*. Sampai dengan 9 Agustus 2023, dari *rating actions* tiga lembaga pemeringkat utama dunia terdapat 13 *rating upgrades*,

18 *rating downgrades*, dan 19 *revised outlook* (6 revisi positif, 5 revisi *stable upward*, 1 revisi *stable downward*, 7 revisi negatif).

Peringkat kredit suatu negara memberikan gambaran tingkat risiko yang ditanggung sebagai kompensasi yang ditanggung investor. Keputusan peringkat kredit dari kedua lembaga tersebut memainkan peran penting dalam meningkatkan akses aliran modal internasional dan meningkatkan kepercayaan investor untuk membuka peluang investasi yang lebih besar. Selain itu, peringkat kredit tersebut menunjukkan kondisi perekonomian Indonesia sangat *resilient* terhadap tekanan ketidakpastian global.

Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas perekonomian di tengah tantangan ketidakpastian ekonomi global. Dalam menghadapi situasi yang tidak pasti, Pemerintah akan terus melaksanakan kebijakan fiskal yang responsif, berhati-hati, dan berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan menjaga kestabilan ekonomi negara.

Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Melalui Skema KPBU Bantu Menerangi Kabupaten Madiun

Berepatan dengan hari jadi Kabupaten Madiun yang ke-455, Pemerintah Kabupaten Madiun, Jawa Timur meresmikan Proyek Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Madiun pada 18 Juli 2023 lalu. Proyek ini merupakan hasil nyata pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), utamanya Pemkab Madiun sebagai Penanggung Jawab

Proyek Kerja Sama (PJPK) dan PT Tritunggal Madiun Terang selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP), serta PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) yang berperan memberikan penjaminan pemerintah. Ruang lingkup proyek APJ Madiun meliputi pembangunan baru (tanpa penambahan teknologi atau fitur baru pada sistem lama/ retrofit), tahap pengoperasian, dan pemeliharaan terhadap lebih dari 7.400 titik lampu yang tersebar di Jalan Nasional, Jalan Kabupaten Utama, dan Jalan Perkotaan.

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha merupakan salah satu bentuk pembiayaan alternatif di tengah keterbatasan anggaran, utamanya dalam membangun infrastruktur, dengan berdasarkan pada suatu perjanjian (kontrak) antara Pemerintah yang diwakili oleh Menteri/Kepala Lembaga/ Pemerintah Daerah selaku PJKP dan pihak swasta selaku BUP, dengan memperhatikan prinsip pembagian risiko di antara para pihak. Implementasi skema KPBU berpotensi mengurangi beban APBN dan APBD yang berupa alokasi belanja modal untuk konstruksi di awal proyek sehingga diharapkan dapat mengurangi keseimbangan primer negatif. Selain itu, pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU juga berperan dalam menurunkan biaya tidak terduga termasuk beberapa *cost overrun* maupun *time overrun*. Skema KPBU juga memungkinkan pembayaran untuk layanan infrastruktur dihubungkan dengan kualitas tersedianya layanan sehingga dapat meningkatkan kualitas penganggaran. Secara umum, KPBU merupakan skema pembiayaan infrastruktur yang terbukti dapat mengurangi *gap* pembiayaan infrastruktur di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan KPBU di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyediakan berbagai fasilitas dalam bentuk dukungan pemerintah yang dibutuhkan oleh para *stakeholders* terkait. Dalam tahap persiapan, PJKP sebagai pemilik proyek dapat mengakses fasilitas *Project Development Facility* (PDF) guna mempersiapkan dokumen proyek yang dapat diterima *market players*. Selanjutnya, PJKP juga dapat mengakses fasilitas *Viability Gap Fund* (VGF) sebagai *tools* untuk meningkatkan *bankability* dari proyek dan juga fasilitas Penjaminan dalam rangka meningkatkan *creditworthiness* dari proyek. Keseluruhan fasilitas tersebut diberikan dalam rangka mengupayakan sebanyak mungkin dana-dana non APBN untuk bisa masuk ke dalam Pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia. Sesuai dengan fungsinya, masing-masing fasilitas dukungan Pemerintah dimaksud diharapkan dapat menjawab *concerns* utama para *stakeholders* KPBU (PJKP, *Investors*, *Lenders*) pada setiap tahapan pembangunan proyek infrastruktur.

Proyek APJ Madiun merupakan proyek KPBU *unsolicited*, artinya, proyek tersebut diprakarsai oleh pihak swasta. Dalam konteks pembiayaan,



proyek KPBU APJ Madiun memiliki nilai investasi sebesar Rp114 miliar dengan periode kerja sama selama 10 tahun, terhitung sejak tanggal operasi komersial. Proyek APJ Madiun mendapatkan dukungan penjaminan dari PT PII (Persero), di mana penjaminan ini merupakan salah satu faktor penting yang membuat BUP merasa nyaman dan percaya untuk berinvestasi dalam proyek ini. Sementara itu skema pembayaran kepada badan usaha yang digunakan adalah skema pembayaran ketersediaan layanan atau *Availability Payment* (AP), yaitu pembayaran akan dilakukan secara berkala oleh PJKP (dalam hal ini Pemkab Madiun) kepada BUP atas tersedianya layanan infastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/ atau kriteria yang disepakati dalam Perjanjian KPBU. Dalam skema ini, jika layanan yang

diperjanjikan dalam perjanjian Kerjasama tidak tersedia atau rusak, maka Pemkab Madiun berhak untuk tidak membayarkan AP dimaksud atau mengurangi pembayaran AP dimaksud kepada badan usaha sesuai dengan proporsi kerusakan yang terjadi.

Dari sisi kebijakan strategis, Proyek APJ Madiun ini merupakan bagian dari pengembangan sistem jaringan infrastruktur wilayah guna mendukung tingkat pelayanan kepada masyarakat sebagaimana amanat Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029 (Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011). Proyek ini juga dimaksudkan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur sesuai Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan

Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Perencanaan proyek APJ Madiun telah dimulai sejak pertengahan tahun 2020, hingga akhirnya selesai konstruksi pada Juli 2023 dan diresmikan pada tanggal 18 Juli 2023. Peresmian tersebut dilakukan pada malam hari dengan menyalakan sebanyak 7.459 titik lampu yang tersebar di 15 kecamatan sehingga Kabupaten Madiun menjadi “Padhang Jingga” atau terang-benderang. Dengan demikian, Proyek APJ Kabupaten Madiun menjadi proyek APJ pertama di Indonesia yang telah mencapai tahapan operasi komersial dan sekaligus menjadi kado ulang tahun untuk masyarakat di Kampung Pesilat tersebut.

Sebagaimana tema yang diusung Pemkab Madiun, “Investasi Terang di Kampung Pesilat”, investasi Proyek APJ ini memberikan manfaat dan dampak yang cukup besar bagi masyarakat Madiun, baik dari sisi keamanan dan keselamatan, ekonomi, dan lingkungan. Melalui penerangan yang memadai dari APJ, risiko kecelakaan dan kriminalitas dapat

diminimalisir, sehingga dapat memberikan rasa aman dan kemudahan bagi masyarakat, khususnya dalam melakukan aktivitas di malam hari. Selanjutnya, peningkatan aksesibilitas dan mobilitas malam hari di wilayah Kabupaten Madiun dapat berkontribusi memperpanjang jam operasional UMKM dan pelaku ekonomi lainnya sehingga perputaran ekonomi semakin tinggi. Selain itu, proyek APJ juga merupakan bentuk komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah dalam melakukan efisiensi energi melalui pergantian lampu lebih hemat energi dalam rangka mendukung *green infrastructure*.

Sebelumnya, pada tanggal 14 Juni 2023, Pemkab Madiun telah meraih Penghargaan Khusus dalam Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 dalam Inovasi Pembiayaan Alternatif KPBU untuk Penyediaan Infrastruktur. Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan dalam hal perencanaan, pencapaian pelaksanaan, dan inovasi pembangunan, dalam hal ini, Pemkab Madiun sebagai Kabupaten pertama yang menerapkan KPBU. Tentunya, keberhasilan proyek ini tak lepas dari komitmen PJPB serta dukungan dan koordinasi rutin dari

berbagai pihak seperti Kantor Bersama KPBU dan PT. PII, juga PT. Tritunggal Madiun Terang selaku BUP, serta kerja sama yang baik dengan DPRD Kabupaten Madiun. Harapannya, Proyek KPBU APJ Madiun dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk mengembangkan infrastruktur daerahnya guna meningkatkan layanan dan kemudahan bagi masyarakat.

Pertumbuhan Ekonomi
Triwulan II 2023 Kuat,
Penerimaan Pajak
Tembus Lebih dari
Rp1.100 Triliun

Penerimaan Perpajakan

Pada akhir Juli 2023, Penerimaan Pajak ditutup dengan capaian menembus angka lebih dari Rp1.100 triliun. Secara lebih presisi, realisasi Penerimaan Pajak pada periode Januari sampai dengan Juli 2023 mencapai Rp1.109,10 triliun. Capaian yang solid tersebut mencerminkan kinerja ekonomi Indonesia yang baik pada semester I 2023. Secara triwulanan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2023 tumbuh 5,17 persen (*yoy*), meneruskan baiknya pertumbuhan pada

triwulan I 2023 yang juga tumbuh di atas 5 persen (*yoy*). Sedangkan secara kuartalan, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada level 3,86 persen (*qtq*)^[2], dengan ditopang oleh pertumbuhan yang terjadi di hampir semua komponen pengeluaran.

Selaras dengan capaiannya, pertumbuhan penerimaan pajak pada periode ini juga baik. Pertumbuhan Penerimaan Pajak kembali mencatatkan pertumbuhan positif dengan meneruskan tren laju pertumbuhan positif

Pertumbuhan yoy kumulatif tahun 2022 dan 2023



Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2023

Uraian	Target 2023 (Triliun)	Realisasi s.d. 31 Juli 2023		
		Rp (Triliun)	$\Delta\%$ '22-'23	% Realisasi
Pajak Penghasilan (PPh)	935.07	681.86	5.84	72.92
- Non Migas	873.63	636.56	6.98	72.86
- Migas	61.44	45.31	-7.99	73.74
PPN & PPnBM	742.95	417.64	10.60	56.21
PBB	31.31	3.26	32.97	10.41
Pajak Lainnya	8.70	6.34	51.67	72.88
Jumlah	1,718.03	1,109.10	7.84	64.56

pada bulan-bulan sebelumnya. Secara lebih detil, Penerimaan Pajak pada periode Januari sampai dengan Juli 2023 berhasil tumbuh 7,84 persen (yoy). Angka laju pertumbuhan tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan pada periode sebelumnya, namun masih berada pada zona hijau.

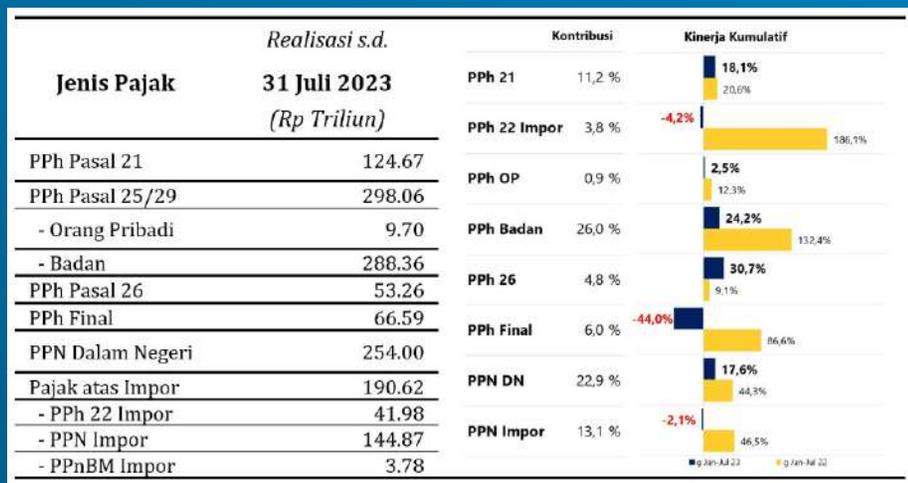
Bila dicermati lebih dalam, kinerja pertumbuhan Penerimaan Pajak pada periode ini juga didukung oleh kinerja yang positif dari mayoritas kelompok Penerimaan Pajak. Kelompok Pajak Lainnya menjadi *top performer* pada periode ini dengan capaian pertumbuhan kumulatif mencapai 51,67 persen (yoy). Kuatnya pertumbuhan Pajak Lainnya merupakan peran dari peningkatan setoran atas Bea Meterai yang terdiri dari Meterai Tempel, Meterai Elektronik, dan Meterai Dalam Bentuk Lain. Mengikuti akselerasi dari kelompok Pajak Lainnya, kelompok Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga tumbuh kuat 32,97 persen (yoy), namun kontribusinya sangat kecil pada total penerimaan secara keseluruhan. Selanjutnya, pajak yang dikenakan atas konsumsi yaitu PPN dan PPhBM tumbuh 10,60 persen (yoy) di tengah kuatnya konsumsi dalam negeri. Terakhir, PPh Migas

mengalami koreksi pada periode sampai dengan Juli 2023 karena adanya moderasi harga BBM, namun demikian kelompok Pajak Penghasilan yang lain yaitu PPh non-Migas masih bertahan dengan pertumbuhan positif sebesar 6,98 persen (yoy).

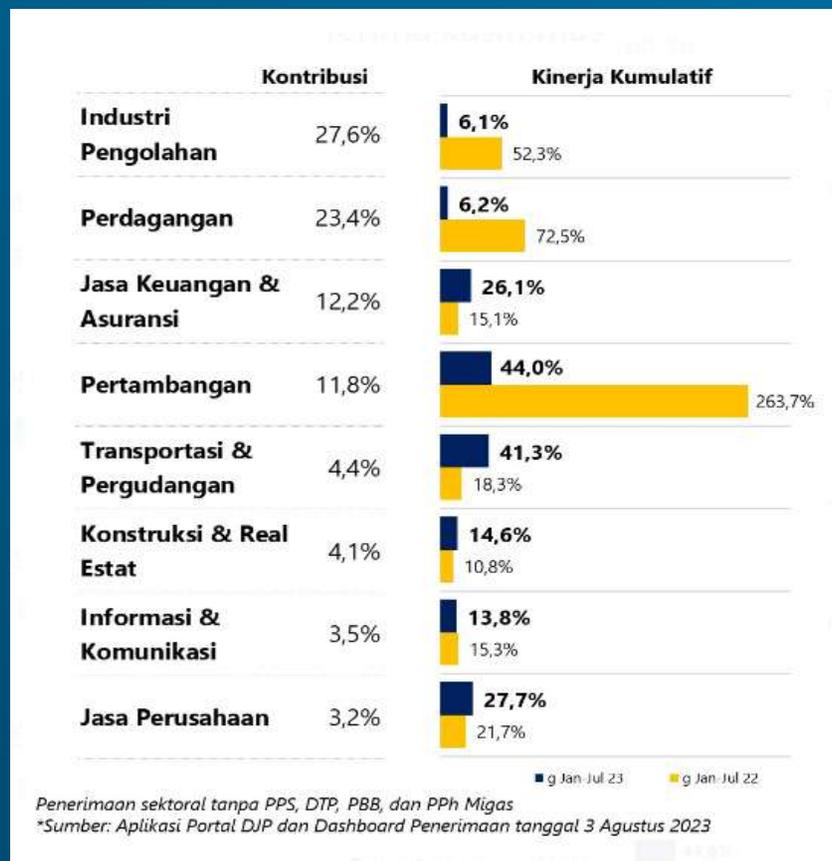
Kinerja Penerimaan Per Jenis Pajak

Secara umum, kinerja Penerimaan Pajak sampai dengan Juli 2023 ditopang oleh kinerja ekonomi yang baik pada semester I 2023. Dampak dari kinerja ekonomi yang baik menyebabkan mayoritas pertumbuhan kumulatif jenis pajak positif. Meskipun demikian, tren kinerja penerimaan mengalami perlambatan disebabkan oleh penurunan harga komoditas, peningkatan restitusi, penurunan nilai impor, dan tidak berulangnya kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Dampak dari faktor-faktor tersebut terlihat pada perkembangan kinerja jenis pajak seperti PPh Badan, PPN DN, dan pajak-pajak terkait impor. PPh Badan menjadi jenis pajak dengan kontribusi terbesar dan tumbuh secara kumulatif *double digits* namun mengalami perlambatan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Adapun capaian pertumbuhan dari PPh Badan adalah sebesar

Penerimaan Jenis-Jenis Pajak Utama



Penerimaan Pajak Sektoral



24,24 persen (yoy), kinerja PPh Badan melambat seiring dengan penurunan angsuran PPh Pasal 25 oleh Wajib Pajak. Selain itu, perlambatan pertumbuhan PPh Badan juga sejalan dengan ekspektasi profitabilitas Wajib Pajak yang menurun terutama pada Wajib Pajak yang bergerak pada sektor komoditas.

Selanjutnya, selaras dengan pertumbuhan kumulatif dari PPh Badan, kinerja pajak atas konsumsi yaitu PPN DN dan kinerja pajak atas tenaga kerja yaitu PPh Pasal 21 juga tumbuh menggembirakan. Kedua jenis pajak tersebut tumbuh masing-masing sebesar 17,61 persen (yoy) dan 18,09 persen (yoy). Baiknya kinerja dari PPN DN ditunjang oleh pertumbuhan PDB triwulan II 2023, adapun pertumbuhan PDB triwulan II 2023 utamanya ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh hingga 5,23 persen (yoy), dan realisasi belanja pemerintah yang tumbuh mencapai 10,62 persen (yoy). Sejalan dengan kinerja PPN DN, kinerja PPh Pasal 21 juga membukukan capaian yang impresif seiring dengan terjaganya utilisasi tenaga kerja. Sebagai gambaran, upah tenaga kerja yang tinggi pada periode ini disokong oleh tiga sektor utama yaitu Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi dan

Perdagangan. PPh Pasal 21 dari ketiga sektor tersebut tumbuh masing-masing sebesar 17,49 persen (yoy), 16,66 persen (yoy), dan 17,72 persen (yoy). Selain itu, bila diperhatikan dari sebaran wilayahnya, tiga provinsi dengan kontribusi PPh Pasal 21 terbesar juga menunjukkan pertumbuhan PPh Pasal 21 yg signifikan yaitu DKI Jakarta (tumbuh 17,67 persen), Jawa Barat (15,71 persen), dan Jawa Timur (16,83 persen).

Berikutnya, kinerja pajak-pajak atas kegiatan impor yang meliputi PPh Pasal 22 Impor, dan PPN Impor mengalami penurunan seiring dengan moderasi harga minyak bumi. Akibatnya, terjadi penurunan pada nilai impor yang meliputi bahan baku dan penolong. Namun demikian, nilai impor atas barang konsumsi dan modal masih mengalami peningkatan. Di sisi lain, kinerja pada jenis pajak PPnBM Impor patut diapresiasi. Capaian pertumbuhan sampai dengan Juli 2023 pada PPnBM Impor mencapai 49,05 persen (yoy). Capaian PPnBM Impor tersebut menandakan kuatnya konsumsi atas barang mewah pada periode ini. Selain jenis pajak dengan kontribusi terbesar yang telah disebutkan sebelumnya, kinerja PPh Final, PPh Pasal 26, dan PPh OP membukukan capaian yang bervariasi. PPh Final

mengalami kontraksi yang cukup dalam pada periode ini karena kebijakan PPS yang tidak berulang. Sedangkan PPh Pasal 26 dan PPh OP masih tumbuh positif dengan capaian masing-masing sebesar 30,75 persen (*yoy*) dan 2,53 persen (*yoy*).

Kinerja Penerimaan Per Sektor

Kinerja kumulatif Penerimaan Pajak sektoral mengalami pertumbuhan positif pada seluruh sektor utama. Pada periode Januari sampai dengan Juli 2023, laju pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan berkisar di angka 6 persen. Lebih tepatnya 6,14 persen (*yoy*) untuk Sektor Industri Pengolahan dan 6,21 persen (*yoy*) untuk Sektor Perdagangan. Pertumbuhan kumulatif yang masih berada di level positif namun melambat pada kedua sektor tersebut dipengaruhi oleh moderasi harga komoditas dan penurunan nilai impor. Selain hal tersebut, perlambatan pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan dibandingkan dengan periode sebelumnya, merupakan efek dari ekspektasi profitabilitas tahun 2023 yang menurun pada angsuran PPh Badan. Selain sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan, sektor dengan

kontribusi terbesar ketiga dan keempat yaitu Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi dan Sektor Pertambangan juga mencatatkan performa positifnya. Pertumbuhan kumulatif sektor-sektor tersebut masing-masing sebesar 26,05 persen (*yoy*) dan 44,04 persen (*yoy*). Adapun pertumbuhan dari Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi jauh lebih baik dari tahun lalu didorong oleh peningkatan penyaluran kredit dan suku bunga. Sedangkan kinerja dari Sektor Pertambangan dipengaruhi oleh kinerja Wajib Pajak komoditas yang masih kuat pada semester I 2023, namun cenderung mulai melambat sejalan dengan moderasi harga komoditas.

Begitu pula dengan Sektor Transportasi dan Pergudangan, Sektor Konstruksi dan *Real Estate*, Sektor Informasi dan Komunikasi dan Sektor Jasa Perusahaan yang juga tumbuh positif secara kumulatif masing-masing sebesar 41,29 persen (*yoy*), 14,56 persen (*yoy*), 13,81 persen (*yoy*), dan 27,66 persen (*yoy*). Pada Sektor Transportasi dan Pergudangan pertumbuhan yang impresif dan konsisten sejak awal tahun ditopang oleh peningkatan mobilitas masyarakat dan kegiatan jasa penunjang angkutan. Sedangkan pada Sektor Konstruksi dan *Real Estate*,

pertumbuhan pada periode ini ditopang oleh peningkatan kegiatan konstruksi dan penjualan *Real Estate* rumah pribadi. Terakhir, kedua sektor dengan kontribusi terkecil yaitu Sektor Informasi dan Komunikasi dan Sektor Jasa Perusahaan mampu tumbuh positif *double digits*. Adapun pertumbuhan dari Sektor Informasi dan Komunikasi dipengaruhi oleh peningkatan pemanfaatan teknologi informasi, sedangkan kinerja pertumbuhan pada Sektor Jasa Perusahaan karena pemulihan ekonomi yang mendorong peningkatan *demand* atas jasa.

Kepabeanaan
dan Cukai

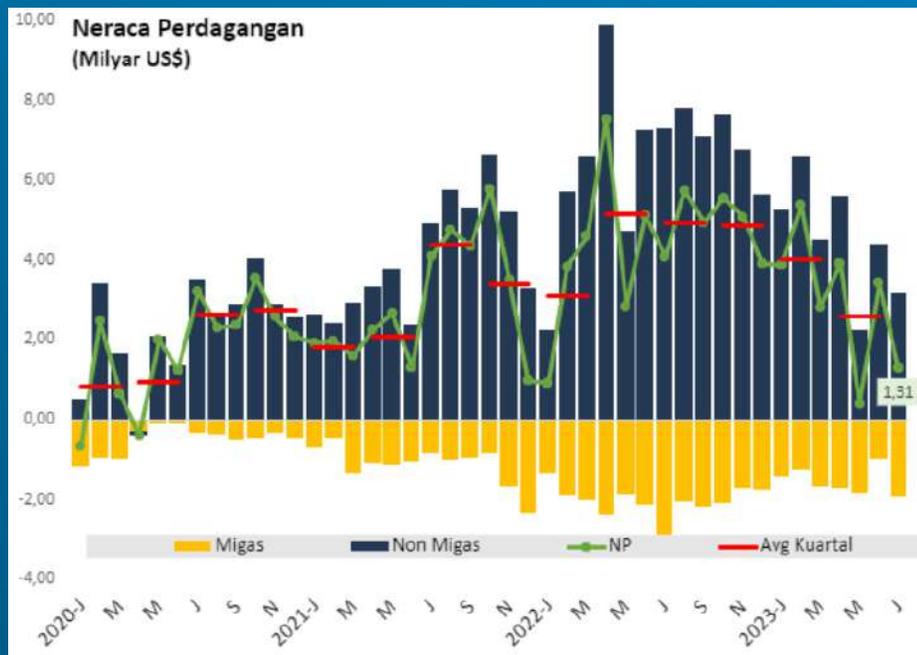
Neraca Perdagangan Nasional
Bulan Juli 2023 Tercatat Surplus
USD1,31 Miliar

Kepabeanaan dan Cukai

Pada Juli 2023, Neraca Perdagangan Indonesia menunjukkan kinerja yang memuaskan dengan mencatatkan surplus sebesar USD1,31 miliar. Surplus ini melanjutkan tren positif yang telah terjadi sejak Juni 2020, dan dapat dikatakan sebagai kabar baik bagi perekonomian Indonesia. Keberhasilan ini didorong oleh kinerja ekspor terutama Migas yang masih tumbuh. Dengan demikian, secara total, Neraca Perdagangan Indonesia hingga Juli 2023 mencapai surplus sebesar USD21,24 miliar.

Surplus ini terjadi terutama pada neraca non-Migas, yang menandakan performa positif dalam ekspor komoditas SDA seperti batubara, termasuk lignit, dan minyak goreng. Selain itu, sektor manufaktur seperti olahan logam, pakaian, dan kendaraan juga memberikan kontribusi penting dalam menciptakan surplus tersebut. Namun, perlu diperhatikan bahwa neraca Migas masih mengalami defisit, terutama disebabkan oleh impor bahan bakar dan minyak bumi.

Neraca Perdagangan Indonesia 2020-2023



Realisasi Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai

No.	Jenis Penerimaan	Target APBN	Realisasi		Growth (y-o-y, %)		% Capaian
			2022	2023	2022	2023	
1	BEA MASUK	47,53	27,35	28,40	31,54%	3,83%	59,76%
2	CUKAI	245,45	126,30	115,52	20,82%	-8,54%	47,06%
	Hasil Tembakau	232,59	122,14	111,23	20,63%	-8,93%	47,82%
	Ethil Alkohol	0,14	0,07	0,07	20,90%	-9,90%	48,16%
	MNEA	8,67	4,05	4,16	27,97%	2,89%	48,03%
	Denda Adm. Cukai	-	0,03	0,05	-46,09%	76,31%	-
	Cukai Lainnya	-	0,02	0,01	-13,76%	-16,97%	-
	Plastik & MBDK	4,06	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3	BEA KELUAR	10,21	31,41	5,86	97,84%	-81,34%	57,40%
	TOTAL	303,19	185,07	149,78	31,06%	-19,07%	49,40%
	PPN Impor		148,05	144,87	46,53%	-2,15%	
	PPn BM Impor		2,53	3,78	30,17%	49,05%	
	PPh Pasal 22 Impor		43,81	41,98	186,10%	-4,18%	
	Total PDRI lainnya		194,40	190,62	64,33%	-1,94%	
	TOTAL DJBC + PERPAJAKAN		379,46	340,41	46,22%	-10,29%	

dalam triliun Rupiah
 Sumber: DJPB 4 Agustus 2023

Dalam beberapa waktu terakhir, terjadi dampak dari normalisasi harga yang telah terlihat pada kinerja perdagangan Indonesia. Normalisasi harga ini mencerminkan penyesuaian harga komoditas global yang berpengaruh pada ekspor dan impor negara. Salah satu tanda-tanda dampak normalisasi harga tersebut adalah penurunan pada kinerja ekspor dan impor secara akumulatif.

Perubahan harga komoditas global berdampak pada permintaan dan daya saing ekspor, serta keputusan impor di suatu negara. Meskipun penurunan ini dapat mengindikasikan beberapa tantangan dalam perdagangan, hal ini juga mencerminkan adaptasi terhadap dinamika pasar global.

Pada bulan Juli 2023, kinerja ekspor turun sebesar 18,03 persen (*yoy*), penurunan kinerja terjadi pada sektor Migas maupun sektor non-Migas. Kinerja sektor non-Migas mengalami penurunan, kali ini mencapai 18,74 persen (*yoy*). Penurunan yang paling signifikan terjadi pada ekspor minyak goreng kelapa sawit dan batubara jenis lignit, masing-masing turun sebesar 15,96 persen dan 16,69 persen. Sektor Migas juga mengalami penurunan ekspor sebesar 4,72 persen, yang disebabkan oleh

penurunan ekspor gas alam dampak penurunan harga.

Sementara itu, kinerja impor juga menunjukkan penurunan, yaitu sebesar 8,32 persen pada bulan Juli 2023 (*yoy*), baik pada sektor Migas maupun non-Migas. Impor Migas mengalami penurunan sebesar 29,70 persen disebabkan oleh penurunan impor bahan bakar, gas alam serta minyak pelumas. Impor non-Migas juga mengalami penurunan sebesar 2,69 persen, yang disebabkan oleh impor komoditas utama seperti besi dan baja dasar, peralatan komunikasi, komponen elektronik serta bahan baku plastik.

Hingga tanggal 31 Juli 2023, realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp149,78 triliun atau 49,40 persen dari Target. Penerimaan total menurun 19,07 persen (*yoy*) meskipun Penerimaan BM masih tumbuh. Penurunan pada bulan ini terjadi pada Penerimaan BK akibat harga CPO yang sudah termoderasi, turunnya tarif BK tembaga, turunnya volume ekspor komoditas mineral dan Penerimaan Cukai akibat penurunan produksi HT.

Realisasi atas Penerimaan PDRI lainnya mencapai Rp190,62 triliun atau turun 1,94 persen (*yoy*). Sehingga total

Penerimaan Negara yang telah dikumpulkan dari Kepabeanan dan Cukai serta PDRI lainnya mencapai Rp340,41 triliun atau turun 10,29 persen (yoy).

Dari sisi Penerimaan BM, kinerja positif masih berlanjut dengan capaian 59,76 persen dari Target atau tumbuh 3,83 persen (yoy) menjadi Rp28,40 triliun. Peningkatan penerimaan pada Juli 2023 disebabkan pelemahan kurs Rupiah dan peningkatan tarif rata-rata BM dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Kinerja ini juga turut dipengaruhi komoditas kontributor BM terbesar yang masih tumbuh di antaranya, kendaraan dan suku cadangnya, kawat, serta kosmetik.

Penerimaan BK mencapai Rp5,86 triliun atau 57,40 persen dari Target. Kinerja ini mengalami penurunan yang signifikan sebesar 81,34 persen (yoy). Penurunan tersebut dipengaruhi harga CPO yang lebih rendah dan turunnya volume ekspor mineral. Penerimaan BK dari komoditas kelapa sawit turun 81,67 persen (yoy), mengikuti harga referensi CPO yang turun. Harga referensi CPO pada bulan Juli 2022 mencapai USD1.615,83/MT turun menjadi USD791,02/MT pada Juli 2023. Kemudian BK dari tembaga mengalami penurunan sebesar

81,43 persen (yoy) terjadi akibat penurunan volume ekspor dan penyesuaian tarif BK tembaga dari 2,50 persen menjadi 0 persen. Diikuti BK dari bauksit yang juga turun 85,98 persen akibat pelarangan ekspor bauksit.

Cukai merupakan mesin utama penerimaan Kepabeanan dan Cukai, penerimaannya mencapai Rp115,52 triliun atau 47,06 persen dari Target. Kinerja penerimaan ini menunjukkan pelemahan dengan penurunan sebesar 8,54 persen (yoy). Penurunan penerimaan Cukai terjadi pada HT, Etil Alkohol (EA) dan cukai lainnya.

Penerimaan CHT turun 8,93 persen (yoy), menjadi Rp111,23 triliun atau 47,06 persen dari Target. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya pemesanan pita cukai. Penurunan ini juga disebabkan penurunan produksi pada bulan Maret diikuti produksi April yang relatif stagnan, penurunan produksi pada bulan Maret 2023 dipengaruhi adanya lonjakan di basis produksi Maret 2022 akibatantisipasi kenaikan PPN.

Produksi HT s.d. Juli 2023 turun 3,59 persen (yoy), disebabkan Tarif rata-rata tertimbang hanya naik 2,02 persen lebih rendah dari kenaikan normatif 10 persen,

disebabkan produksi Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) golongan 1 yang memiliki tarif tinggi turun lebih dalam dibandingkan jenis lainnya.

Penerimaan Cukai akan didorong untuk tetap meningkat, namun demikian produksi batang rokok harus dikendalikan. Hal ini sejalan dengan fungsi Cukai untuk membatasi peredaran barang tertentu. Berdasarkan pembahasan kebijakan tarif Cukai HT tahun 2023, dengan rata-rata tertimbang kenaikan tarif Cukai HT sebesar 10 persen, produksi sigaret di tahun 2023 diproyeksikan tetap menurun.

Penerimaan MMEA naik 2,89 persen (yoy) menjadi Rp4,16 triliun, atau mencapai 48,03 persen dari Target. Peningkatan ini disebabkan adanya pertumbuhan produksi MMEA dengan tarif tinggi, yaitu golongan B Dalam Negeri dan MMEA golongan B dan golongan C Impor. Sedangkan produksi total masih terkendali, turun 1,37 persen (yoy) yang berasal dari penurunan produksi Dalam Negeri golongan A yang bertarif rendah.

Dari sisi Penerimaan Cukai EA, kinerjanya mengalami penurunan 9,09 persen (yoy) menjadi Rp65,98 miliar atau 48,16 persen dari Target. Kinerja Penerimaan EA turun karena sebagian besar diberikan fasilitas tidak dipungut atau pembebasan untuk keperluan medis atau bahan baku barang yang tidak dikenai Cukai. Dilihat dari nilai penerimaannya, sebenarnya kinerja Cukai EA masih berada pada pola normal. Sebagai informasi tambahan, sepanjang 2022 penerimaan rata-rata Cukai EA sebesar Rp0,01 triliun per bulan.

Penerimaan
Negara Bukan
Pajak

Kinerja Deviden BUMN non-
Perbankan Tumbuh 45,43 Persen

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Capaian PNBPN hingga 31 Juli 2023 masih menunjukkan kinerja yang positif, meskipun mengalami pelambatan sejak awal tahun 2023. Pelambatan ini terjadi seiring pelemahan ekonomi global dan ketidakpastian pasar dampak perang Rusia-Ukraina.

Realisasi PNBPN hingga 31 Juli 2023 sebesar Rp355,55 triliun atau 80,55 persen dari Target, tumbuh 5,41 persen (yoy). Kinerja Pendapatan SDA non-Migas sektor Minerba dan KND masih menjadi lokomotif

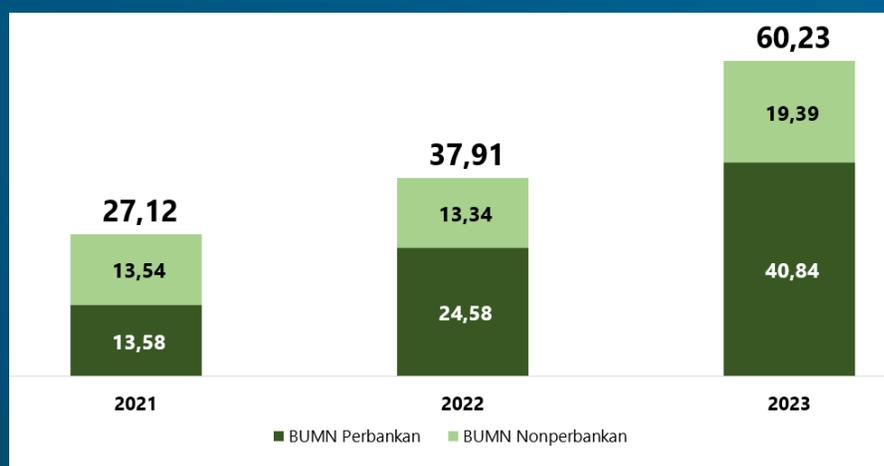
utama yang mendorong realisasi PNBPN. Meski harga komoditas energi termoderasi, upaya peningkatan PNBPN melalui penyempurnaan regulasi dan perbaikan kinerja BUMN berdampak positif menyumbang penerimaan negara.

Pendapatan SDA hingga 31 Juli 2023 mencapai Rp156,40 triliun atau tumbuh 12,99 persen (yoy). Kinerja positif Pendapatan SDA ini mayoritas disumbang dari SDA Nonmigas yang masih tumbuh *double digits*. Pendapatan SDA non-

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP (Miliar Rupiah)	APBN 2023	Realisasi s.d. 31 Juli 2023	% APBN	% Growth (YoY)
Penerimaan Negara Bukan Pajak	441.391,81	355.545,06	80,55	5,41
A Pendapatan SDA	195.975,38	156.399,18	79,81	12,99
1 Migas	131.169,39	68.936,05	52,55	(23,59)
a Minyak Bumi	96.137,04	59.111,22	61,49	(27,71)
b Gas Bumi	35.032,35	9.824,83	28,05	16,35
2 Nonmigas	64.805,99	87.463,14	134,96	81,45
a Pendapatan Pertambangan Minerba	54.030,12	83.425,37	154,41	89,90
b Pendapatan Kehutanan	5.161,67	2.758,15	53,44	1,29
c Pendapatan Perikanan	3.500,00	83,46	2,38	(87,87)
d Pendapatan Panas Bumi	2.114,20	1.196,16	56,58	39,24
B Pendapatan KND	49.100,00	60.234,22	122,68	58,87
1 Bagian Laba BUMN Perbankan	24.852,72	40.839,35	164,33	66,17
2 Bagian Laba BUMN Non Perbankan	24.247,28	19.394,87	79,99	45,43
C Pendapatan PNBP Lainnya	113.300,04	96.055,09	84,78	(11,58)
a. Pendapatan Penjualan Hasil Tambang	31.209,95	26.913,37	86,23	(34,99)
b. Pendapatan Minyak Mentah (DMO)	5.302,92	-	-	(100,00)
c. Pendapatan PNBP K/L	76.787,17	69.141,73	90,04	10,29
D Pendapatan BLU	83.016,39	42.856,57	51,62	(18,08)

Setoran Dividen Bank Himbara Realisasi s.d 31 Juli Periode 2021 - 2023



Migas tumbuh 81,45 persen (yoy), sedangkan SDA Migas mengalami kontraksi 23,59 persen (yoy).

Realisasi Pendapatan SDA Migas mengalami pelambatan dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Penurunan ini utamanya disebabkan menurunnya harga minyak mentah Indonesia (ICP). Harga minyak mentah dunia juga mengalami penurunan dampak risiko ketegangan geopolitik, tingkat inflasi, serta pelemahan ekonomi beberapa negara di dunia. Faktor lain yang mempengaruhi SDA Migas adalah menurunnya *lifting* minyak. Pada periode bulan Desember 2022 hingga Juni 2023, rata-rata ICP mengalami penurunan 24,50 persen dan *lifting* minyak bumi menurun 2,28 persen. Adapun *lifting* gas bumi mengalami kenaikan 1,99 persen. Namun, kenaikan *lifting* gas bumi hingga bulan Juni 2023 belum mampu mendorong lebih tinggi Pendapatan SDA Migas.

Realisasi Pendapatan SDA non-Migas sebesar Rp87,46 triliun atau 134,96 persen dari Target, atau tumbuh 81,45 persen (yoy).

Realisasi capaian signifikan Pendapatan SDA non-Migas ini disumbang dari sektor Pertambangan Minerba berkontribusi Rp83,43 triliun

atau 154,41 persen dari Target dan tumbuh 89,90 persen (yoy). Kontribusi sektor Pertambangan Minerba tersebut utamanya berasal dari peningkatan iuran produksi/*royalty* batubara. Pendapatan Negara Bukan Pajak dari *royalty* batubara hingga Juli 2023 mencapai Rp66,22 triliun atau meningkat lebih dari 2 (dua) kali lipat dari periode yang sama tahun 2022.

Kenaikan ini merupakan dampak implementasi PP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Meski rata-rata HBA mengalami penurunan selama periode bulan Januari sampai dengan Juli 2023, namun kenaikan tarif *royalty* batubara mampu menutupi penurunan tersebut.

Rata-rata HBA periode bulan Januari sampai dengan Juli 2023 mengalami kontraksi sebesar 42,45 persen (yoy). Selanjutnya, dari sisi volume penjualan batubara periode Januari sampai dengan Juli 2023 mengalami peningkatan sebesar 8,65 persen (yoy). Penerimaan PNBPN dari *royalty* batubara hingga Juli 2023 mengalami peningkatan dan tumbuh 130,46 persen (yoy). Peningkatan PNBPN dari *royalty* batubara ini meningkat dengan ditetapkannya PP Nomor 26

Tahun 2022 yang berlaku sejak bulan September 2022. Dalam PP tersebut diatur harga baru *royalty* batubara hingga 13,5 persen dari harga yang semula hanya 7 persen dari harga (untuk HBA sama dengan atau lebih besar USD90/ton).

Pendapatan SDA non-Migas bulan Juli 2023 sektor Kehutanan tumbuh 1,29 persen (*yoy*). Kenaikan ini utamanya berasal dari kenaikan produksi kayu bulat sebesar 1.352.371 meter kubik periode bulan Januari sampai dengan Juli 2023 dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Di samping itu, kenaikan tersebut juga disumbang adanya optimalisasi penagihan piutang PNBP sektor Kehutanan.

Adapun sektor Perikanan mengalami kontraksi 87,87 persen (*yoy*). Kontraksi ini disebabkan perubahan mekanisme pemungutan PNBP Perikanan. Sebelumnya menggunakan metode perhitungan PNBP Pungutan Hasil Perikanan (PHP) pra-Produksi menjadi pasca-Produksi dimana yang semula Wajib Bayar membayar PNBP pada saat akan berlayar dan dihitung untuk perkiraan PNBP 1 Tahun menjadi membayar PNBP nya pada saat mendaratkan ikan per *trip*. Rata-rata operasional kapal penangkap ikan berlayar selama 2-4 bulan sehingga

masih sangat sedikit kapal yang mendapatkan ikan hingga akhir Juli 2023. Selain itu, masih banyak kapal perikanan yang masih memiliki ijin kapal pra-Produksi sehingga belum memiliki kewajiban pembayaran PNBP PHP pasca-Produksi dan terdapat kewajiban PNBP hasil verifikasi yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan belum dilakukan penyetoran oleh Wajib Bayar.

Selanjutnya, sektor Panas Bumi tumbuh 39,24 persen (*yoy*). Kenaikan ini utamanya berasal dari tambahan Setoran Bagian Pemerintah (SBP) pada periode triwulan II tahun 2023 dengan diterimanya pembayaran atas penjualan listrik PLTP Wayang Windu Unit I yang sebelumnya tertunda akibat perbedaan indeks eskalasi harga listrik.

Realisasi Pendapatan KND sampai dengan bulan Juli 2023 telah mencapai Rp60,23 triliun atau 122,68 persen dari Target. Capaian ini tumbuh 58,87 persen (*yoy*). Pendapatan ini mayoritas disumbang dari setoran dividen BUMN Perbankan (Himbara) untuk tahun buku 2022 sebesar Rp40,84 triliun. Kenaikan laba bersih pada Bank Himbara juga diiringi dengan kebijakan kenaikan dividen *payout ratio* sehingga meningkatkan setoran dividen yang diterima Pemerintah tahun 2023.

Di samping itu, terdapat setoran dividen BUMN non-Perbankan sebesar Rp19,39 triliun. Kinerja BUMN non-Perbankan hingga 31 Juli 2023 mencapai 79,99 persen dari Target. Capaian setoran dividen BUMN non-Perbankan yang tumbuh 45,43 persen (yoy) ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 yang terkontraksi 1,50 persen (yoy). Kenaikan setoran dividen BUMN non-Perbankan ini antara lain berasal dari semakin membaiknya kinerja keuangan PT. Telekomunikasi Indonesia, PT. PLN, dan PT. Semen Indonesia.

Capaian realisasi Pendapatan PNBK Lainnya hingga bulan Juli 2023 mencapai Rp96,06 triliun atau 84,78 persen dari Target. Capaian ini mengalami kontraksi 11,58 persen (yoy). Dua komponen PNBK Lainnya yaitu Pendapatan PNBK K/L pada beberapa K/L tumbuh 7,11 persen (yoy) dan Pendapatan Penjualan Hasil Tambang (PHT) terkontraksi 34,99 persen (yoy). Adapun Pendapatan Minyak Mentah (DMO) hingga 31 Juli 2023 belum terdapat realisasi penerimaan.

Pendapatan PNBK K/L hingga 31 Juli 2023 tercapai Rp69,14 triliun atau 90,04 persen dari Target. Kenaikan ini utamanya berasal dari Pendapatan Layanan K/L antara lain

disumbang dari Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta hasil tipikor dan Pendapatan Layanan Administrasi Hukum (seperti visa, paspor, izin imigrasi, dll.).

Adapun realisasi Pendapatan PHT hingga 31 Juli 2023 mencapai Rp26,91 triliun atau 86,23 persen dari Target atau terkontraksi 34,99 persen (yoy). Penurunan realisasi tersebut disebabkan adanya pendapatan tidak berulang tahun 2022 yang berasal dari pemberlakuan PP Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau PNBP di Bidang Usaha Pertambangan Batubara.

Pendapatan BLU sampai dengan bulan Juli 2023 mencapai Rp42,86 triliun atau mencapai 51,62 persen dari Target, terkontraksi 18,08 persen (yoy). Penurunan ini terutama disebabkan berkurangnya Pendapatan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit dampak penurunan harga CPO sejak bulan Maret 2023. Penurunan CPO ini disebabkan penurunan *demand* akibat pulihnya *supply* minyak nabati. Realisasi Pendapatan Pengelolaan Dana Perkebunan Kepala Sawit hingga 31 Juli 2023 mencapai Rp15,41 triliun atau terkontraksi 43,98 persen (yoy).

Belanja
Pemerintah
Pusat



Realisasi Belanja
Pemerintah Pusat (BPP)
utamanya untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat

Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi BPP mencapai Rp1.020,35 triliun (45,42 persen terhadap Pagu). Realisasi BPP tersebut dimanfaatkan untuk pelaksanaan program di bidang perlindungan sosial, pendidikan, infrastruktur, kesehatan, serta pertahanan dan keamanan. Selain itu, realisasi BPP juga digunakan untuk pembayaran kewajiban Pemerintah seperti subsidi dan kompensasi, serta gaji dan tunjangan pegawai termasuk pembayaran manfaat pensiun.

Belanja K/L

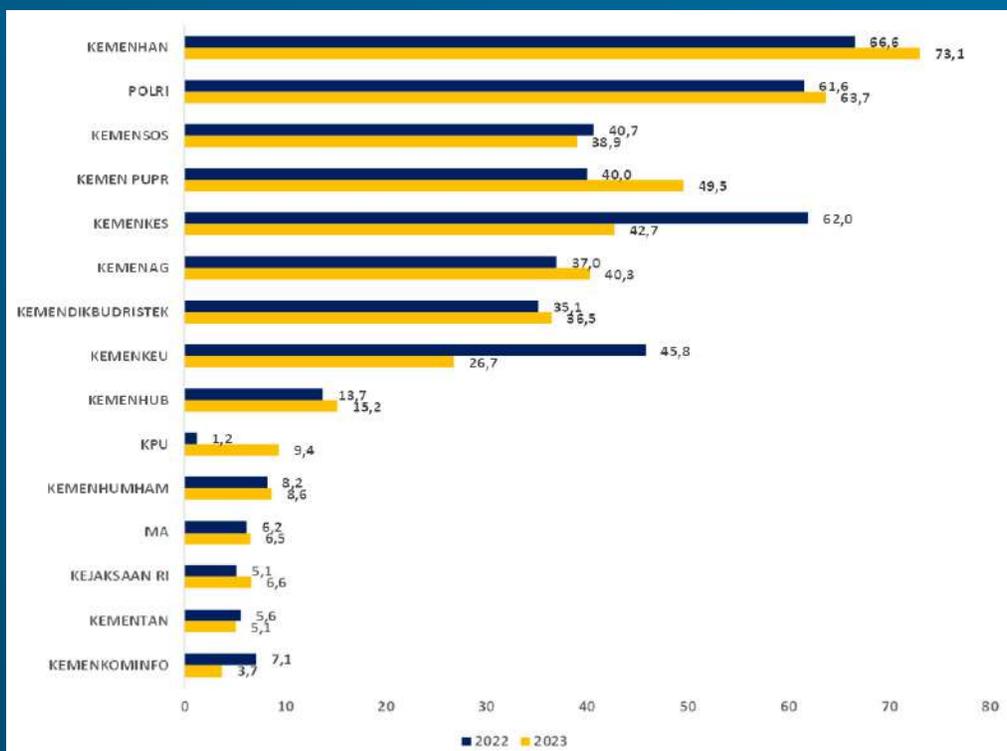
Realisasi Belanja K/L mencapai Rp492,98 triliun atau 49,3 persen dari Pagu. Realisasi belanja K/L utamanya dimanfaatkan untuk PKH, Kartu Sembako, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), PIP, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan proyek infrastruktur di antaranya jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, bendungan, serta jaringan irigasi. Selain itu realisasi Belanja K/L juga dimanfaatkan untuk dukungan persiapan pelaksanaan Pemilu

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2023

Belanja Pemerintah Pusat	APBN	Realisasi sd Juli	% thd APBN	Growth (%)
Belanja K/L	1.000,84	492,98	49,26	0,47
Belanja Pegawai	272,92	154,56	56,63	1,69
Belanja Barang	375,17	177,40	47,29	(7,82)
Belanja Modal	209,19	82,97	39,66	18,18
Bantuan Sosial	143,57	78,06	54,37	2,69
Belanja Non-K/L	1.245,61	527,37	42,34	(2,40)
a.l. Belanja Pegawai	169,62	103,95	61,28	5,26
Subsidi	298,50	112,40	37,65	(3,28)
Total	2.246,46	1.020,35	45,42	(1,03)

(dalam triliun Rupiah)

Realisasi Belanja 15 Kementerian/Lembaga Dengan Pagu Terbesar s.d 31 Juli TA 2022-2023 (dalam triliun Rupiah)



tahun 2024 dan pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp154,56 triliun atau 56,63 persen dari Pagu. Realisasi Belanja Pegawai tersebut digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN/TNI/POLRI, termasuk pembayaran THR dan Gaji ke-13. Realisasi tersebut naik sebesar 1,69 persen (yoy).

Belanja Barang terealisasi sebesar Rp177,40 triliun atau 47,29 persen dari Pagu. Realisasi Belanja Barang tersebut mengalami kontraksi sebesar 7,82 persen (yoy), utamanya dipengaruhi pengelolaan dana kelapa sawit dan pembayaran klaim perawatan pasien Covid-19 pada tahun 2022 yang relatif besar. Di sisi lain, kinerja realisasi Belanja Barang dimanfaatkan antara lain untuk : (1) pemeliharaan/perawatan Barang Milik Negara (BMN) pada Kemenhan dalam rangka mendukung alutsista pada Matra Darat, Matra Laut, Matra Udara dan Umum Integratif; (2) pemeliharaan/perawatan sarana prasarana sumber daya air, penyediaan akses rumah layak huni, penanggulangan

darurat akibat bencana, dan preservasi jalan nasional pada Kemen PUPR; dan (3) pengadaan/dukungan logistik dan pelayanan kesehatan pada POLRI, (4) penyaluran dana BOS dan peningkatan akses/mutu pendidikan keagamaan pada Kemenag; dan (5) pembentukan Badan *Ad-hoc* dalam rangka kegiatan Tahapan Pemilu 2024 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Realisasi Belanja Modal mencapai Rp82,96 triliun atau 39,66 persen dari Pagu. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 18,18 persen (yoy), antara lain karena meningkatnya belanja infrastruktur pada Kemen PUPR dan modernisasi alat utama sistem senjata TNI (alutsista) oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Kinerja realisasi Belanja Modal dipengaruhi antara lain oleh : (1) belanja modal peralatan dan mesin dengan pemanfaatan antara lain pengadaan alat material khusus (almatsus) oleh POLRI, pengadaan alutsista pada Kemenhan, dan pengadaan peralatan intelijen pada Kejaksaan dan Badan Intelijen Negara (BIN); (2) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan

dengan pemanfaatan antara lain untuk pembangunan bendungan, jaringan irigasi, dan preservasi jalan dan jembatan oleh Kemen PUPR, serta pembangunan prasarana perkeretaapian, fasilitas bandar udara dan pelabuhan oleh Kemenhub; (3) Belanja Modal gedung dan bangunan dengan pemanfaatan antara lain pembangunan gedung kantor pemerintahan Kawasan IKN oleh Kemen PUPR, terminal bandara pada Kemenhub, gedung perkuliahan pendidikan tinggi pada Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi (Kemendikbudristek), rumah sakit pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan rusun prajurit TNI & POLRI.

Realisasi Bantuan Sosial sebesar Rp78,06 triliun (54,37 persen terhadap Pagu), tumbuh 2,69 persen (yoy), dimanfaatkan untuk antara lain: (1) penyaluran bantuan sosial pada Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar Rp37,27 triliun a.l. untuk PKH untuk 9,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), penyaluran program kartu sembako untuk 18,7 juta KPM; (2) penyaluran Bantuan Sosial pada Kemenkes sebesar Rp27,03 triliun untuk pembayaran bantuan iuran

kepada 96,7 juta PBI JKN; (3) penyaluran bantuan PIP sebesar Rp6,12 triliun bagi 11,1 juta siswa dan KIP kuliah sebesar Rp6,09 triliun bagi 718,7 ribu mahasiswa pada Kemendikbudristek dan Kemenag; serta (4) bantuan penanggulangan bencana pada BNPB sebesar Rp1,54 triliun yang dimanfaatkan antara lain untuk bantuan stimulan rumah kepada 42,4 ribu KK terdampak bencana Kabupaten Cianjur.

Dari perspektif organisasi, realisasi Belanja pada 15 K/L dengan pagu terbesar yang mewakili 86,53 persen dari total realisasi Belanja K/L. Realisasi tersebut utamanya didorong antara lain oleh realisasi Anggaran pada Kemenhan, POLRI, Kemenkes, KemenPUPR, Kementerian Agama (Kemenag), dan KPU.

Belanja Non-K/L

Realisasi Belanja non-K/L mencapai Rp527,37 triliun atau terkontraksi 2,40 persen (yoy). Penurunan ini utamanya dipengaruhi oleh perbedaan periode tagihan atas kewajiban kompensasi BBM dan listrik sesuai hasil audit. Realisasi Belanja non-K/L utamanya digunakan untuk penyaluran subsidi dan kompensasi,

serta pemenuhan kewajiban Pemerintah terhadap para pensiunan ASN/TNI/Polri, termasuk pembayaran THR dan gaji ke-13 untuk pensiunan.

Belanja Pegawai Non-K/L terealisasi sebesar Rp103,95 triliun atau 61,28 persen dari Pagu. Realisasi tersebut antara lain digunakan untuk pemenuhan kewajiban Pemerintah terhadap para pensiunan ASN/TNI/POLRI, termasuk pembayaran THR dan gaji ke-13 untuk pensiunan.

Realisasi Belanja Subsidi mencapai Rp112,40 triliun atau 37,65 persen dari Pagu, turun sebesar 3,28 persen (yoy). Realisasi tersebut terdiri atas: (a) Subsidi Energi sebesar Rp79,87 triliun, mencakup Subsidi BBM, Subsidi LPG Tabung 3 Kg, dan Subsidi Listrik; dan (b) Subsidi non-Energi sebesar Rp32,52 triliun, mencakup Subsidi Pupuk, Subsidi Bunga Kredit Program, Subsidi PSO, dan Subsidi Pajak DTP. Realisasi pembayaran Subsidi Energi tersebut untuk penyaluran BBM bersubsidi sebesar 8.654,22 ribu KL, LPG Tabung 3 Kg sebesar 3,98 juta MT, pelanggan listrik bersubsidi sejumlah 39,25 juta pelanggan, dan volume konsumsi listrik

bersubsidi sebesar 32,33 TWh. Selanjutnya, realisasi Subsidi non-Energi meliputi antara lain penyaluran pupuk bersubsidi mencapai 4,12 juta ton, Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) diberikan kepada 2,29 juta debitur dengan total penyaluran KUR mencapai Rp125,62 triliun, dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan untuk 111,01 ribu unit rumah.

Realisasi Belanja Lain-Lain mencapai Rp69,79 triliun atau 21,19 persen dari Pagu. Realisasi tersebut utamanya digunakan untuk pembayaran kewajiban kompensasi BBM dan listrik sebesar Rp66,06 triliun. Manfaat lainnya dari realisasi Belanja Lain-Lain di antaranya adalah pelaksanaan Program Kartu Prakerja sebesar Rp2,54 triliun, terutama untuk biaya pelatihan dan insentif bagi 586 ribu orang peserta. dan listrik sebesar Rp52,04 triliun. Manfaat lainnya dari realisasi Belanja Lain-Lain di antaranya adalah pelaksanaan Program Kartu Prakerja sebesar Rp1,53 triliun, terutama untuk biaya pelatihan dan insentif peserta sebesar Rp1,49 triliun bagi 354,08 ribu orang peserta.

A vibrant outdoor market scene with people, stalls, and goods. In the foreground, a woman in a blue hijab and floral dress stands near a stall with woven baskets. To her right, a man in a black shirt and jeans stands with his hands in his pockets. In the background, a man in a blue uniform and cap is working at a stall. The market is bustling with activity, and the ground is paved with blue and grey tiles.

Transfer ke
Daerah dan
Dana Desa

Sampai dengan Juni 2023, TKD per Juli 2023 telah terealisasi sebesar Rp440,89 triliun atau 54,12 persen dari Pagu.

Transfer ke Daerah

Sampai dengan Juli 2023, TKD per Juli 2023 telah terealisasi sebesar Rp440,89 triliun atau 54,12 persen dari Pagu. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan sebesar 6,20 persen (yoy).

DANA BAGI HASIL

Hingga Juli 2023, realisasi Dana Bagi Hasil telah mencapai Rp55,65 triliun atau 40,84 persen dari Pagu, naik sebesar 71,22 persen (yoy). Capaian tersebut terutama karena adanya kenaikan

pagu DBH SDA Minerba 2023 sebesar 31,23 persen (yoy), kenaikan pagu DBH SDA Migas 2023 sebesar 16,10 persen (yoy), serta kenaikan pagu DBH CHT 2023 sebesar 36,39 persen (yoy). Selain itu, kenaikan penyaluran juga didukung oleh peningkatan kepatuhan daerah dalam menyampaikan syarat salur dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

DANA ALOKASI UMUM

Realisasi penyaluran DAU sampai dengan Juli 2023 sebesar Rp226,57 triliun atau

57,21 persen dari Pagu atau mengalami penurunan sebesar 4,62 persen (*yoy*). Penurunan tersebut disebabkan karena penyaluran DAU Yang Ditentukan Penggunaannya dilakukan per tahap, dimana tahap I untuk DAU Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, dan Bidang Pekerjaan Umum sudah salur 100 persen, sementara untuk tahap II maksimal s.d 31 Agustus 2023. Selain itu, DAU Penggajian Formasi PPPK belum tersalurkan karena keterlambatan proses rekrutmen dan penetapan NIP PPPK secara nasional.

DANA TRANSFER KHUSUS

Sampai dengan Juli 2023, DAK Fisik telah disalurkan sebesar Rp13,61 triliun atau 25,47 persen dari Pagu, mengalami penurunan sebesar 7,70 persen (*yoy*) yang dikarenakan oleh penurunan penyelesaian kontrak pekerjaan pada beberapa bidang sebagai syarat salur DAK Fisik Tahap I.

Sementara itu, DAK non-Fisik terdapat realisasi sebesar Rp93,33 triliun atau 71,63 persen dari Pagu, naik sebesar 25,03 persen (*yoy*). Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena peningkatan kepatuhan penyampaian syarat salur oleh satuan pendidikan sehingga Dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan sudah hampir tersalur seluruhnya.

DANA OTONOMI KHUSUS (Otsus) DAN DANA KEISTIMEWAAN (Dais) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)

Per Juli 2023, Dana Otsus telah terealisasi sebesar Rp7,14 triliun atau 41,44 persen dari pagu atau mengalami penurunan sebesar 23,34 persen (*yoy*). Penurunan tersebut dikarenakan beberapa Pemda mengalami sanksi penundaan penyaluran Dana Otsus selama satu bulan setelah dokumen syarat salur lengkap dan benar diterima. Hal ini terjadi karena Pemda terlambat menyampaikan dokumen syarat salur secara lengkap dan benar sampai dengan batas waktu pada masing-masing tahap diterima, dimana untuk dokumen syarat salur Dana Otsus tahap I diterima paling lambat akhir bulan April dan dokumen syarat salur Dana Otsus tahap II diterima paling lambat akhir bulan Juni. Di samping itu, pagu alokasi Dana Otsus Provinsi Aceh mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2023 yaitu menjadi sebesar 1 persen dari plafon DAU Nasional (pagu tahun sebelumnya sebesar dua persen dari plafon DAU Nasional).

Sementara itu, Dais DIY telah terealisasi sebesar Rp1,09 triliun atau 80,00

persen dari Pagu. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan sebesar 3,10 persen (*yoy*) yang dikarenakan adanya kenaikan pagu alokasi Dais DIY tahun anggaran (TA) 2023 dibanding dengan alokasi TA 2022, dimana Dais DIY TA 2023 sebesar Rp1,42 triliun naik 7,5 persen dibanding TA 2022 sebesar Rp1,32 triliun serta Pemerintah Provinsi DIY menyampaikan dokumen syarat salur Tahap II TA 2023 secara lengkap dan benar pada bulan Mei 2023, lebih cepat dibanding tahun sebelumnya.

DANA DESA

Realisasi penyaluran Dana Desa pada Juli 2023 sebesar Rp40,59 triliun, 57,99 persen dari Pagu atau turun 2,55 persen (*yoy*), yang disebabkan beberapa daerah belum menyampaikan syarat salur tahap II tahun 2023.

Selanjutnya, penggunaan Dana Desa masih diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi di desa berupa pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang sampai bulan Juli 2023 telah disalurkan ke rekening kas desa sebesar Rp5,45 triliun kepada 2,86 juta KPM di 74.126 desa. Selain itu Dana Desa tahun 2023 ditentukan penggunaannya untuk program

ketahanan pangan dan hewani, dana operasional Pemerintah desa, program kesehatan termasuk penanganan *stunting*, serta penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa.

INSENTIF FISKAL

Penyaluran Insentif Fiskal (IF) atas Kinerja Tahun Sebelumnya untuk daerah berkinerja baik sebesar Rp3,0 triliun dan untuk daerah tertinggal berkinerja baik sebesar Rp1,0 triliun. Realisasi IF pada Juli 2023 telah mencapai Rp2,04 triliun atau 25,44 persen dari Pagu, mengalami penurunan sebesar 4,9 persen (*yoy*). Capaian tersebut disebabkan jumlah daerah yang sudah memenuhi syarat salur IF atas kinerja tahun sebelumnya tahap II di 31 Juli 2023 hanya 5 daerah, menurun jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 25 daerah.

REALISASI TKD TAHUN ANGGARAN 2022 DAN

Uraian	2022		2023		
	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
Transfer ke Daerah	804,78	367,68	814,72	440,89	54,12
1. Dana Bagi Hasil	140,43	31,64	136,26	55,65	40,84
2. Dana Alokasi Umum	378,00	216,69	396,00	226,57	57,21
3. Dana Transfer Khusus	189,59	76,00	185,80	107,81	58,02
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	60,87	5,56	53,42	13,61	25,47
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	128,72	70,44	130,30	93,33	71,63
c. Hibah ke Daerah	0,00	0,00	2,08	0,87	25,47
4. Dana Otsus	20,44	6,13	17,24	7,14	41,44
5. Dana Keistimewaan D.I.Y	1,32	1,06	1,42	1,09	80,00
6. Dana Desa	68,00	34,16	70,00	40,59	57,99
7. Insentif Fiskal	7,00	2,00	8,00	2,04	25,44

Halaman Ini Dikosongkan

Dengan pengelolaan yang *prudent* dan akuntabel, realisasi pembiayaan terjaga baik dalam mendukung kinerja APBN

Pembiayaan Utang

Defisit APBN 2023 telah ditetapkan sebesar 2,84 persen terhadap PDB sebagai langkah konsolidasi fiskal yang terukur. Realisasi Pembiayaan Utang per akhir Juli 2023 mencapai Rp194,93 triliun atau 28,0 persen dari Target. Pembiayaan utang tahun 2023 ditargetkan lebih efisien sejalan dengan penurunan defisit dan pemanfaatan SAL. Pemerintah berkomitmen untuk melakukan pengelolaan pembiayaan utang yang *prudent* dan berkelanjutan dengan risiko terkendali pada level yang aman dan kredibel.

Realisasi Pembiayaan Utang terdiri dari realisasi SBN (Neto) sebesar Rp184,05 triliun dan realisasi Pinjaman (Neto) sebesar Rp10,88 triliun. Dari sisi Pinjaman Dalam Negeri, hingga akhir Juli 2023 mencapai Rp3,60 triliun, terdiri dari realisasi Penarikan Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp4,60 triliun dan Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp998,3 miliar. Sementara dari sisi Pinjaman Luar Negeri, telah terealisasi sebesar Rp7,28 triliun, terdiri dari Penarikan Pinjaman Luar

Pembiayaan Utang

per 31 Juli 2023

f Dengan pengelolaan *prudent* dan akuntabel, realisasi pembiayaan terjaga baik dalam mendukung kinerja APBN



Negeri sebesar Rp52,53 triliun dan Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp45,25 triliun.

Sebagian besar realisasi pembiayaan dipenuhi melalui penerbitan SBN domestik melalui lelang reguler yang dilaksanakan melalui mekanisme pasar di mana investor menyampaikan penawaran (*bid*) melalui *Dealer Utama*. Selama bulan Juli 2023, secara bergantian, telah dilaksanakan lelang SBSN dan SUN setiap minggunya, yaitu pada tanggal 4,11,18, dan 25 Juli 2023. Kinerja lelang SBN pada bulan Juli 2023 mencatatkan *bid to cover ratio* sebesar 3,22x. Sementara itu, rata-rata penawaran yang masuk sepanjang tahun 2023 sebesar Rp41,71 triliun/lelang dan rata-rata nominal yang dimenangkan sebesar Rp13,82 triliun/lelang. Penerbitan SBN juga dilakukan melalui *Private Placement* secara terukur, dengan mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan dan kondisi kas negara. Penerbitan SBN melalui *Private Placement* dilakukan sebagai pelengkap yaitu pada tanggal 3 dan 5 Juli 2023 berupa penerbitan SBSN seri SW006 dan SUN seri FR0065, serta penerbitan SUN dalam rangka PPS pada 21 Juli 2023.

Selanjutnya, pada 24 Juli 2023 Pemerintah juga menerbitkan SBN ritel seri ORI023-T3 dan ORI023-T6 dengan total sebesar Rp28,9 triliun. Penerbitan ORI023-T3 dan ORI023-T6 mendapatkan minat yang besar dari masyarakat dan merupakan yang terbesar sejak penerbitan Surat Utang Negara (SUN) ritel. Total investor pada penerbitan kedua seri SBN ritel ini tercatat sebanyak 58.395 investor, dimana 21.173 (36,3 persen dari jumlah total investor) merupakan investor baru. Generasi Milenial kembali mendominasi jumlah investor ORI023-T3 dengan porsi sebesar 41,2 persen dan ORI023-T6 dengan porsi sebesar 48,2 persen, sementara secara nominal masih didominasi oleh generasi *Baby Boomers* (41,5 persen) untuk ORI023-T3 dan generasi X (39,1 persen) untuk ORI023-T6. Selain itu, pada tanggal 10 Juli 2023 pemerintah telah melakukan *early redemption* SBN ritel seri SBR011 sebesar Rp124,7 miliar yang diajukan oleh 1.313 investor. *Early redemption* ini merupakan fasilitas yang diberikan kepada investor SBR011 untuk mendapatkan sebagian pelunasan pokok investasinya sebelum memasuki masa jatuh tempo.

Komposisi Utang

***Data per 31 Juli 2023**

Pemerintah melakukan pengelolaan utang secara baik dengan risiko yang terkendali, antara lain melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo.

Posisi Utang

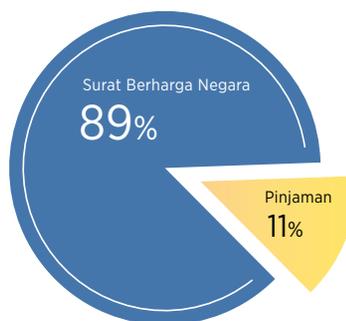
*Data per 31 Juli 2023

Rp **7.855,53**

*dalam triliun Rupiah



Debt to GDP : 37,78%



Surat Berharga Negara

Rp **6.985,20**

*dalam triliun Rupiah



• Domestik	Rp 5.663,46
Surat Utang Negara	Rp 4.569,47
Surat Berharga Syariah Negara	Rp 1.093,99
• Valas	Rp 1.321,74
Surat Utang Negara	Rp 1.021,03
Surat Berharga Syariah Negara	Rp 300,71

Pinjaman

Rp **870,33**

*dalam triliun Rupiah



• Pinjaman DN*	Rp 25,27
• Pinjaman LN*	Rp 845,05
Bilateral	Rp 262,10
Multilateral	Rp 522,88
Comercial Banks	Rp 60,07
Suppliers	Rp -

Pada tanggal 7 Juli 2023, sebagai bentuk komitmen untuk mendukung Gerakan Nasional Wakaf Uang, membantu pengembangan investasi sosial dan pengembangan wakaf produktif di Indonesia, pemerintah resmi membuka masa penawaran Sukuk Wakaf Ritel seri SWR004 kepada wakif individu dan institusi. Masa penawaran berlangsung mulai tanggal 7 Juli – 31 Agustus 2023. Sukuk Wakaf Ritel seri SWR004 memiliki tenor 2 tahun dan menawarkan imbalan secara periodik setiap bulan yang akan disalurkan untuk program/kegiatan sosial yang memiliki dampak ekonomi dan sosial untuk masyarakat.

Sampai dengan akhir Juli 2023, posisi utang Pemerintah berada di angka Rp7.855,53 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 37,78 persen. Rasio utang tersebut menurun dibandingkan bulan lalu dan dibandingkan per akhir tahun 2022, dan berada di batas aman (jauh di bawah 60 persen PDB), sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Rasio utang tersebut juga masih sesuai dengan Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah tahun 2023-2026 di kisaran 40 persen. Di samping itu, pada 25 Juli 2023 *Rating and Investment Information, Inc.* (R&I) telah

menaikkan *outlook* Republik Indonesia menjadi positif dari stabil dan mengafirmasi *Sovereign Credit Rating* di BBB+. Menurut R&I, beberapa faktor utama yang mendukung keputusannya meliputi kinerja ekonomi Indonesia yang kuat dan ketahanannya di tengah ketidakpastian ekonomi global, terjaganya inflasi dalam kisaran yang ditargetkan dan pencapaian konsolidasi fiskal yang lebih awal dari perkiraan, stabilitas keuangan yang terjaga, serta tren penurunan rasio utang Pemerintah.

Pemerintah senantiasa melakukan pengelolaan utang secara hati-hati dengan risiko yang terkendali melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo. Sejalan dengan kebijakan umum pembiayaan utang untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap, komposisi utang Pemerintah didominasi oleh utang domestik yaitu 72,42 persen. Sementara berdasarkan instrumen, komposisi utang Pemerintah mayoritas berupa SBN yang mencapai 88,92 persen. Selain itu, pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan tenor menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif. Per akhir Juli

2023, profil jatuh tempo utang Indonesia terbilang cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (*average time maturity/ATM*) di kisaran 8 tahun.

Pengelolaan utang pemerintah melalui penerbitan SBN terus diupayakan untuk mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik, inklusi keuangan, serta upaya peningkatan literasi keuangan masyarakat dari *savings society* menjadi *investment society*. Sejalan dengan hal tersebut, kepemilikan investor individu dalam SBN domestik terus mengalami peningkatan sejak 2019 yang hanya mencapai 2,95 persen menjadi 6,93 persen per akhir Juli 2023. Selanjutnya, bagi lembaga keuangan, SBN berperan penting untuk memenuhi kebutuhan investasi dan pengelolaan likuiditas, serta menjadi salah satu upaya mitigasi risiko. Hal ini menjadikan perbankan sebagai pemilik SBN domestik terbesar, di mana per akhir Juli 2023 mencapai 31,45 persen, kemudian diikuti perusahaan asuransi dan dana pensiun yang memegang sekitar 17,67 persen. Selain itu, kepemilikan oleh Bank Indonesia sebesar 16,15 persen antara lain digunakan sebagai instrumen

pengelolaan moneter. Asing hanya memiliki SBN domestik sekitar 15,56 persen termasuk kepemilikan oleh Pemerintah dan bank sentral asing. Sementara, sisa kepemilikan SBN dipegang oleh institusi domestik lainnya untuk memenuhi kebutuhan investasi dan pengelolaan keuangan institusi bersangkutan.

Selanjutnya, guna meningkatkan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang, pemerintah terus berupaya mendukung terbentuknya pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan likuid. Salah satu strateginya adalah melalui pengembangan berbagai instrumen SBN, termasuk pula pengembangan SBN tematik berbasis lingkungan (*Green Sukuk*) dan *SDGs* (*SDG Bond* dan *Blue Bond*). Peranan transformasi digital dalam proses penerbitan dan penjualan SBN yang didukung dengan sistem *online* juga tak kalah penting, mampu membuat pengadaan utang melalui SBN menjadi semakin efektif dan efisien, serta kredibel.

Halaman Ini Dikосongkan

